

PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH

Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D
Direktorat Pengembangan Wilayah
**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional**

**Persiapan Survey Stakeholders terhadap
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN**

Jakarta, 8 Maret 2013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA. Ph.D
Tempat/Tgl.Lahir: Yogyakarta, 21 Januari 1965
Golongan : IVB
Alamat Rumah : Komplek Bappenas, Jl. Pertiwi II No.18 Blok A105,
RT 03/RW01, Kedaung, Sawangan, Depok-16516
HP: 085-880-596-992
Alamat Kantor : Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional
Jl. Taman Suropati No. 2-4 Jakarta-10310
Tel.: 021-3193-4195 Fax: 021-3193-4195
E-mail: sumedi@bappenas.go.id
medi1965@gmail.com

PENDIDIKAN

1. Postdoctoral. Graduate School of International Development, Nagoya University, Jepang. Okt-Des. 2006
2. S3. Doctor of Philosophy. Department of Urban Engineering, the University of Tokyo, Jepang. April 2001-Mar. 2004.
3. S2. Master of Arts, Graduate School of International Development, Nagoya University, Jepang. Apr 1997-Mar. 1999.
4. Postgraduate Diploma, Institute of Developing Economies Advanced School, Tokyo, Jepang. Sept. 1994-Mar. 1995.
5. S1. Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada.Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Juni 1984-Juli 1989.

PEKERJAAN

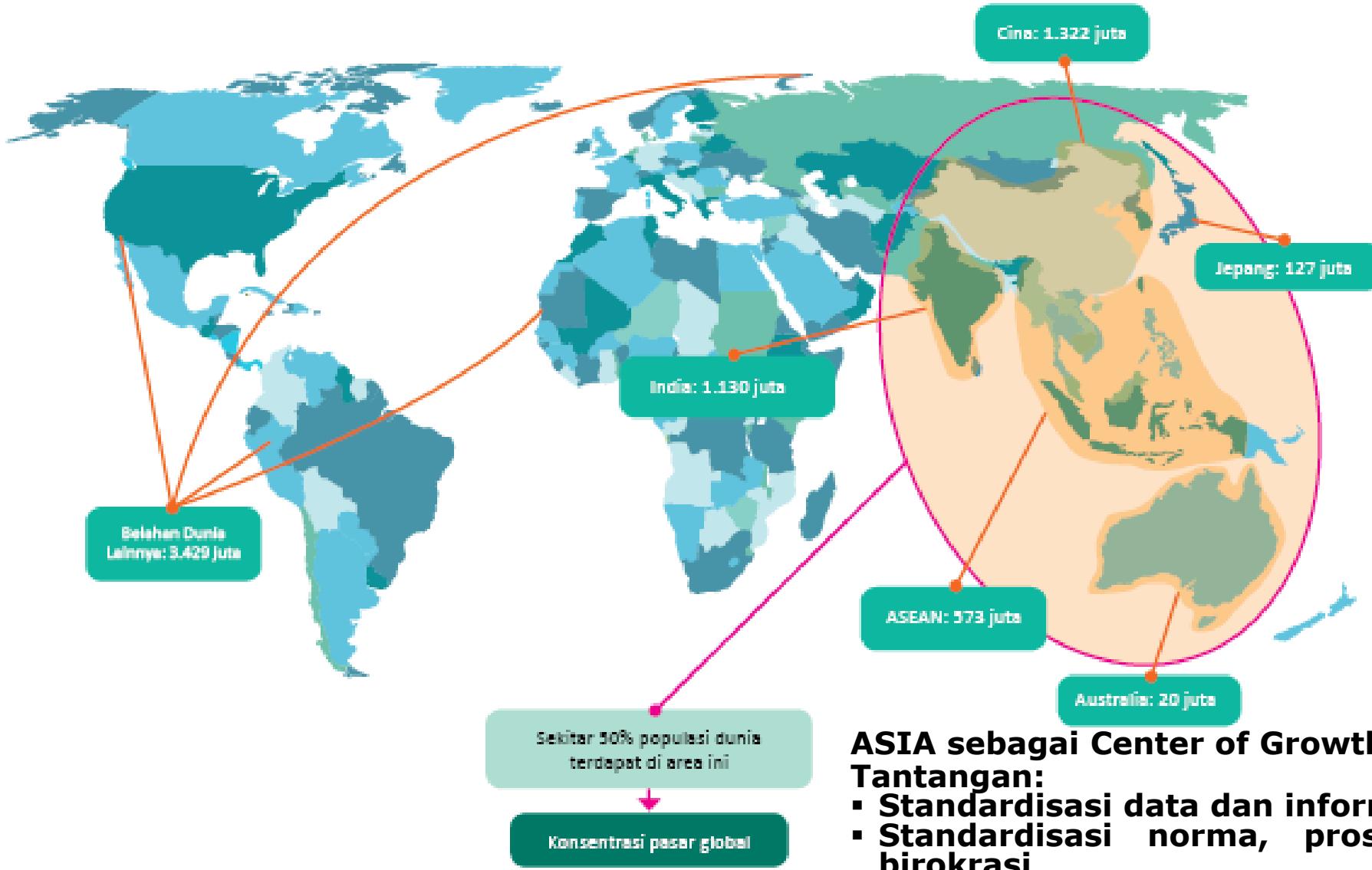
1. Kepala Sub-direktorat, Direktorat Pengembangan Wilayah. Jan 2006-sekarang
2. Kepala Sub-Direktorat, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. Mei 2004-Jan. 2006
3. Kepala Bagian, Biro Pemberdayaan Masyarakat. Des. 2000-Mei 2004
4. Kepala Bagian, Biro Pembangunan Dati II dan Perdesaan. Mei 1999 –Des. 2000
5. Kepala Sub Bagian, Biro Pembangunan Dati II dan Perdesaan. Maret 1994 –Jan. 1997
6. Staf Perencana, Biro Analisa Ekonomi dan Statistik, 1991-Maret1994

KERANGKA PAPARAN

- 1. PENDAHULUAN**
- 2. TRANSFORMASI SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA**
- 3. POLA ALOKASI SUMBER DAYA**
- 4. SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH**
- 5. KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019 PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN**
- 6. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH**
- 7. TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**
- 8. REORIENTASI DAN REVITALISASI MUSRENBANG**
- 9. PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTARDAERAH**
- 10. KOMENTAR KUESIONER**

PENDAHULUAN

POSISI INDONESIA DALAM LINGKUNGAN REGIONAL DAN GLOBAL



ASIA sebagai Center of Growth

Tantangan:

- Standardisasi data dan informasi
- Standardisasi norma, prosedur dan birokrasi
- Standardisasi manajemen sumber daya

POSISI SAATINI



- **Anggota G20** → Prestise dan peluang.
- **Ketua ASEAN** → "Leading" dan motor penggerak.
- **Masyarakat Ekonomi ASEAN** → Pusat produksi, pusat pasar dan pusat wisata dunia.
- **APEC** → Penyeimbang dan pendorong kemajuan.
- **OKI** → Model negara demokrasi.
- **Gerakan Non Blok** → Pendiri dan Penjaga komitmen.

KONDISI SAAT INI: PARADOX

- **Kondisi ekonomi terus meningkat dan membaik** → struktur ekonomi yang belum solid; rendahnya produktivitas, efisiensi dan daya saing; masih terpusatnya kegiatan ekonomi di Jawa-Bali.
- **Kondisi sosial dan budaya terus mencari bentuk** → masih adanya kerentanan sosial; belum tuntasnya transformasi sosial dan budaya; memudarnya ikatan sosial dan melemahnya modal sosial.
- **Kondisi prasarana dan sarana publik mencari solusi tepat** → rusaknya prasarana jalan; terbatasnya prasarana (pelabuhan, terminal dan bandara) dan sarana transportasi (pesawat, kapal dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan).
- **Kondisi politik dan hukum yang stagnan** → lambatnya konsolidasi demokrasi; belum tertatanya reformasi birokrasi daerah; dan belum tuntasnya penegakan hukum.
- **Kondisi ketertiban dan keamanan yang relatif membaik** → konflik sosial, konflik agama, dan konflik daerah perbatasan.
- **Kondisi sumberdaya alam dan lingkungan yang** → terjadinya eksplorasi SDA; meningkatnya kerusakan LH; belum tuntasnya penanganan banjir, pencurian ikan dan pembalakan liar; belum efektifnya RTRW.

MENGAPA PERLU KESERASIAN DAN KETERKAITAN PENGEMBANGAN WILAYAH?

- ✓ **Amanat Konstitusi**
 - Pembukaan UUD 1945 → Kesejahteraan seluruh rakyat dan kemajuan seluruh wilayah → Pemerataan
- ✓ **Konsepsi Wawasan Nusantara**
 - Kesatuan Wilayah Politik → Kesadaran bernegara
 - Kesatuan Wilayah Ekonomi → Integrasi ekonomi nasional
 - Kesatuan Wilayah Sosial → Kesadaran berbangsa
 - Kesatuan Wilayah Budaya → Kesadaran berbudaya
 - Kesatuan Wilayah Geografis → Keterkaitan wilayah
 - Kesatuan Wilayah Hankam → Perlindungan dan pengamanan wilayah
- ✓ **Potensi Wilayah Maritim dan Kepulauan**
 - Penghubung wilayah, bukan pemisah wilayah
- ✓ **Penguatan Daya Saing Nasional**
 - Dibangun dari peningkatan daya saing wilayah

KESERASIAN DAN KETERKAITAN ANTARWILAYAH

- Sebagai negara maritim, keterkaitan antarwilayah yang efisien, kokoh dan terpadu menjadi dasar dari percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.
- Keterkaitan antarwilayah akan mendorong perpindahan arus barang dan jasa, modal, dan informasi secara lebih cepat dan produktif.
- Keterkaitan antarwilayah juga akan mendorong terjaganya kesatuan wilayah sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan yang solid, serta terbangunnya wawasan kebangsaan yang kuat.
- Pembangunan berbasis kewilayahan mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing daerah dan nasional:
 - Mengutamakan pengelolaan sumberdaya lokal secara lebih efisien dan efektif,
 - Mendorong keserasian dan keseimbangan pembangunan antarwilayah,
 - Memperhatikan kaidah pembangunan secara berkelanjutan,
 - Menjaga kesinambungan pembangunan.

TANTANGAN

“Akselerasi” Pembangunan Wilayah

- Optimalisasi potensi wilayah darat dan laut
- Sinergi Pusat-Daerah

“Beyond” Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

- Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru
- Penyediaan jaringan infrastruktur:
 - ✓ Sistem transportasi nasional
 - ✓ Sistem logistik nasional
 - ✓ Sistem informasi nasional

“Nasionalisme” Wawasan Nusantara

- Kesatuan wilayah politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan.
- Pengamanan kawasan perbatasan, pulau kecil dan terluar.

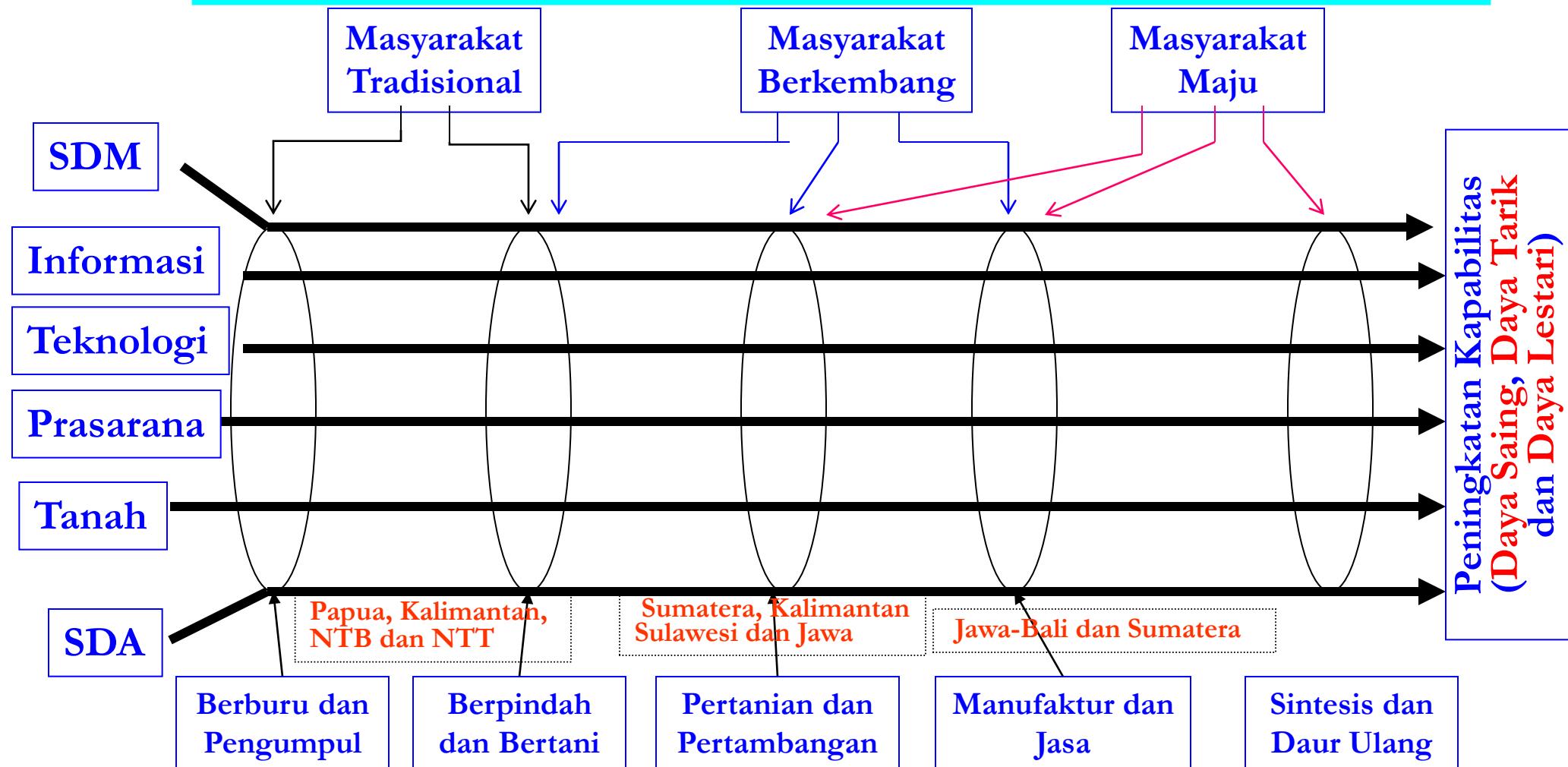
Perekonomian Wilayah 2025

Indonesia
yang
sejahtera,
demokratis
dan
berkeadilan

TRANSFORMASI SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA BANGSA

TRANSFORMASI BANGSA

TRANSFORMASI SOSIAL DAN EKONOMI



TRANSFORMASI SUMBERDAYA

PENDEKATAN NORMAL DESENTRALISASI

PLATFORM/KONSENSUS: RULE OF LAW, PROSES PENGANGGARAN AND ATURAN FISKAL



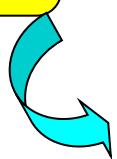
PENDEKATAN BIG-BANG DESENTRALISASI

PLATFORM/KONSENSUS: RULE OF LAW, PROSES PENGANGGARAN DAN ATRUAN FISKAL

- STEP 1:**
Melakukan Debat Nasional tentang Isu dan Kebijakan Desentralisasi
- STEP 2:**
Menyiapkan Desain Kebijakan dan menyiapkan Buku Putih
- STEP 3:**
Menyiapkan dan Menerbitkan Peraturan Perundangan Tentang Desentralisasi
- STEP 4:**
Menyiapkan Peraturan Pelaksanaan dan Rencana Aksi
- STEP 5:**
Melaksanakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
- STEP 6:**
Memantau, Mengevaluasi dan Merumuskan Rekomendasi Kebijakan
- Penilaian terhadap Pencapaian Sasaran Keseluruhan Tujuan
 - Perbaikan Desain Kebijakan
 - Peninjauan ulang Peraturan Perundangan
 - Harmonisasi Peraturan Perundangan



Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

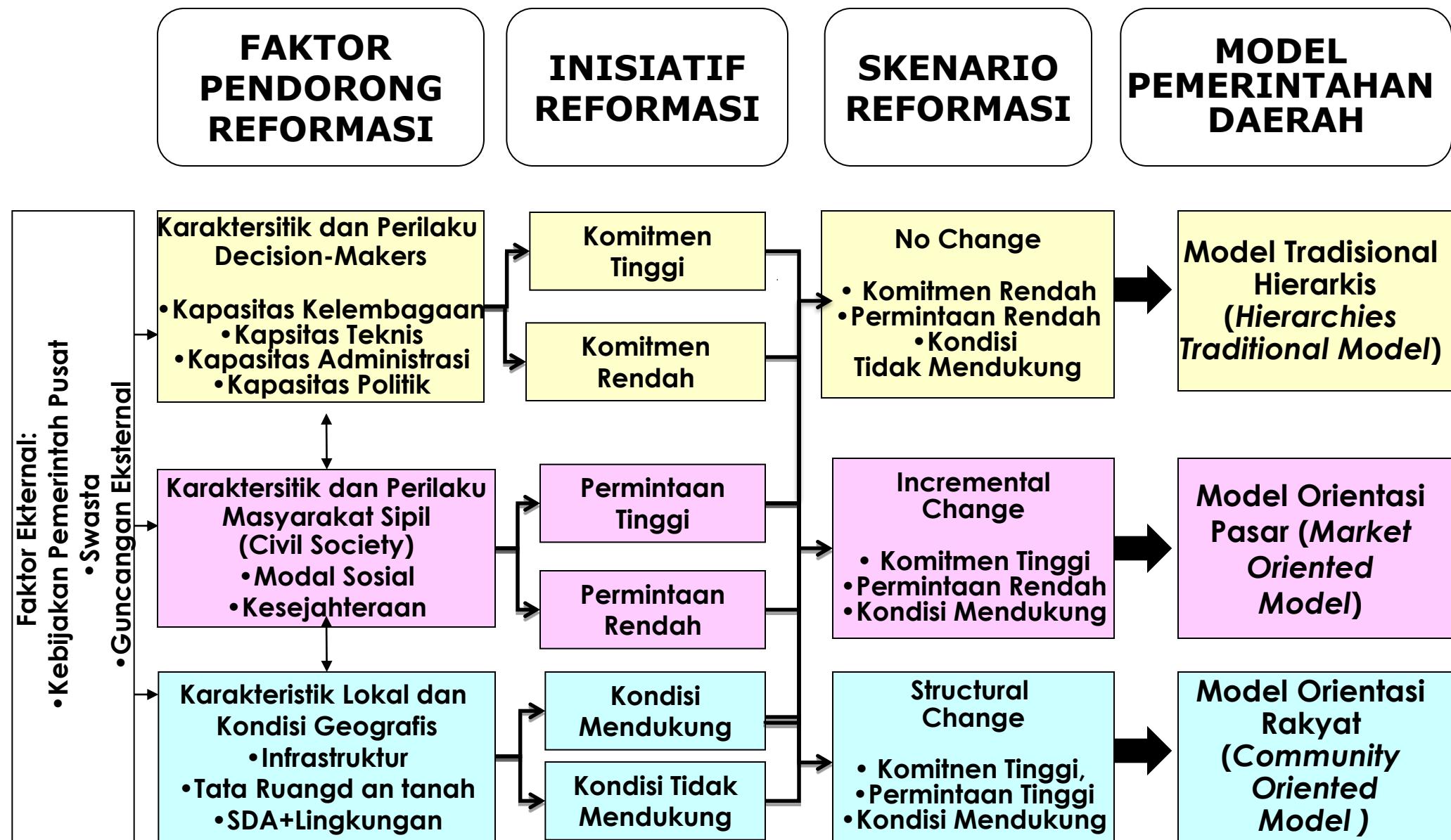


Penerapan Manajemen Kinerja & SPM

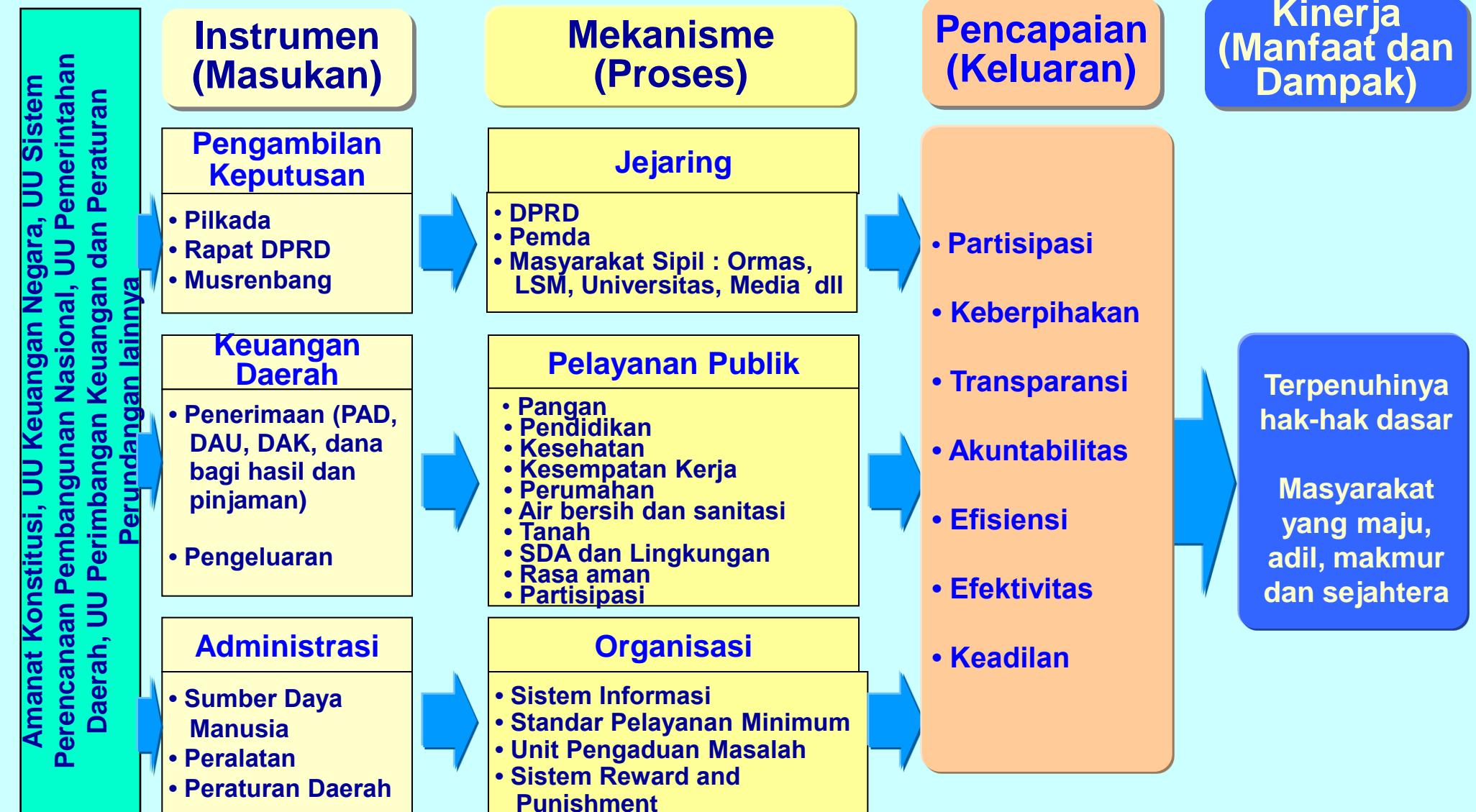
SKENARIO DAN RESIKO DAERAH

Skenario	Karakteristik dan Kondisi Kabupaten/Kota				Resiko	Percentase Kab/Kota
	Kapasitas Birokrasi	Kapasitas Fiskal	Kapasitas IPTEK	Kapasitas SDA		
Skenario 1	Sangat Rendah dan Rendah	Rendah	Sangat Rendah dan Rendah	Rendah	Gagal	23,6%
Skenario 2	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Sangat Rendah dan Rendah	Sedang	Hampir Gagal	10,5%
Skenario 3	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Stagnan	27,7%
Skenario 4	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Pertumbuhan Rendah	28,8%
Skenario 5	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Pertumbuhan Tinggi	9,4%

REFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH



PENDEKATAN BERBASIS HAK DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH



Mekanisme (Proses)

Jejaring

- DPRD
- Pemda
- Masyarakat Sipil : Ormas, LSM, Universitas, Media dll

Pelayanan Publik

- Pangan
- Pendidikan
- Kesehatan
- Kesempatan Kerja
- Perumahan
- Air bersih dan sanitasi
- Tanah
- SDA dan Lingkungan
- Rasa aman
- Partisipasi

Organisasi

- Sistem Informasi
- Standar Pelayanan Minimum
- Unit Pengaduan Masalah
- Sistem Reward and Punishment

Pencapaian (Keluaran)

- Partisipasi
- Keberpihakan
- Transparansi
- Akuntabilitas
- Efisiensi
- Efektivitas
- Keadilan

Kinerja (Manfaat dan Dampak)

Terpenuhinya hak-hak dasar
Masyarakat yang maju, adil, makmur dan sejahtera

Amanat Konstitusi, UU Keuangan Negara, UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Pemerintahan Daerah, UU Perimbangan Keuangan dan Peraturan Perundangannya

Instrumen (Masukan)

Pengambilan Keputusan

- Pilkada
- Rapat DPRD
- Musrenbang

Keuangan Daerah

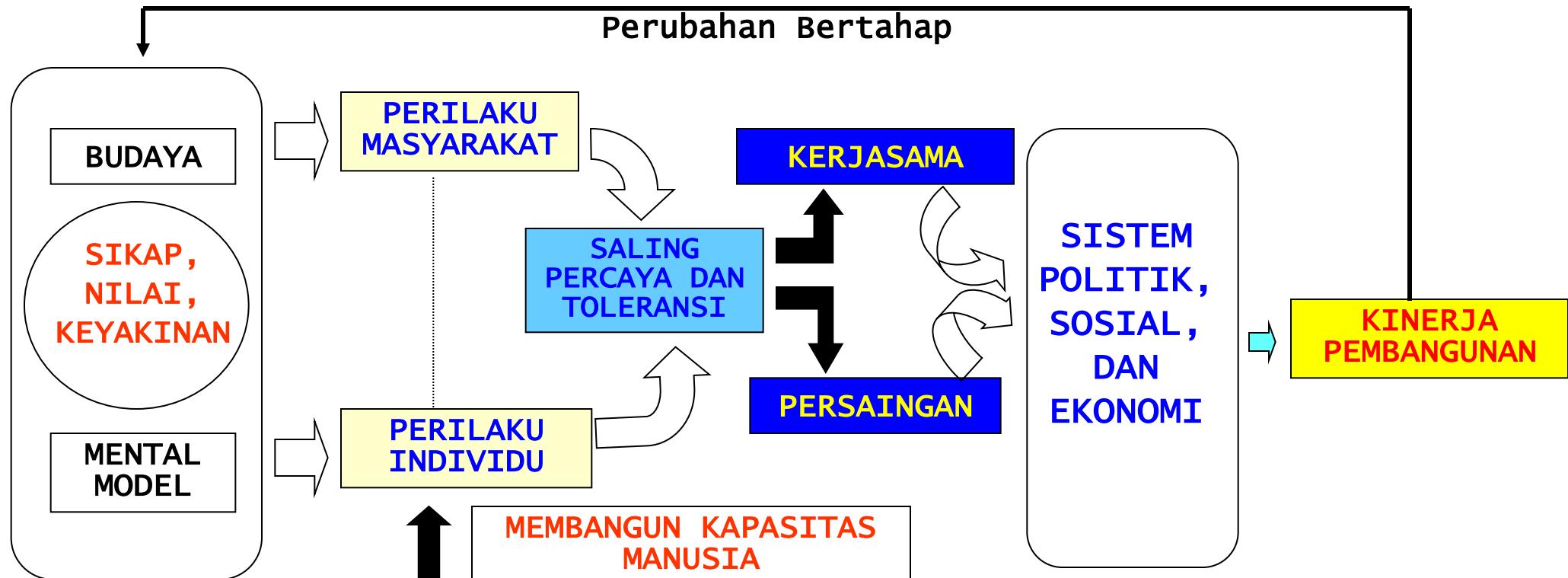
- Penerimaan (PAD, DAU, DAK, dana bagi hasil dan pinjaman)
- Pengeluaran

Administrasi

- Sumber Daya Manusia
- Peralatan
- Peraturan Daerah

Waktu

BUDAYA DAN KINERJA PEMBANGUNAN



- Perlakuan adil dan tanpa diskriminasi
- Pelayanan pendidikan yang bermutu
- Pelayanan kesehatan yang bermutu
- Penelitian dan pengembangan
- Profesionalisme
- Penghargaan terhadap prestasi dan kinerja
- Penciptaan suasana yang stabil

Sumber: Dimodifikasi dari Lawrence Harrison dan Stace Lindsay. Culture and Development.

POLA ALOKASI SUMBER DAYA

ALOKASI SUMBERDAYA ANTARWILAYAH

WILAYAH	DANA DEKON + TP		DANA PERIMBANGAN		INVESTASI PMA	
	RATA-RATA 2005-2009 (Rp. Juta)	SHARE (%)	RATA-RATA 2005-2009 (Rp. Juta)	SHARE (%)	RATA-RATA 2005-2008 (US \$ Juta)	SHARE (%)
SUMATERA	37.213	15,65	62.138	27,65	1.133	11,29
JAWA-BALI	157.630	66,31	78.519	34,94	8.516	84,91
KALIMANTAN	11.721	4,93	30.487	13,57	283	2,82
SULAWESI	15.950	6,71	23.811	10,60	76	0,76
NUSA TENGGARA	5.995	2,52	9.965	4,43	8	0,08
MALUKU	4.278	1,80	5.889	2,62	7	0,07
PAPUA	4.942	2,08	13.890	6,18	5	0,05
TOTAL	237.729	100,00	224.698	100,00	10.030	100,00

Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan BKPM

Distriusi Investasi PMDN (%):

1. Jawa-Bali dan Sumatera: 86,78
2. Kalimantan: 7,19
3. Sulawesi: 5,26
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 0,08
5. Papua: 0,70

Distribusi Kredit Perbankan (%):

1. Jawa-Bali dan Sumatera: 88,22
2. Kalimantan: 5,18
3. Sulawesi: 4,50
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 1,21
5. Papua: 0,59

Distriusi Dana Dekon+TP (%):

1. Jawa-Bali dan Sumatera: 81,69
2. Kalimantan: 4,93
3. Sulawesi: 6,71
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 4,32
5. Papua: 2,08

Distriusi Dana Perimbangan (%):

1. Jawa-Bali dan Sumatera: 62,59
2. Kalimantan: 13,57
3. Sulawesi: 10,60
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 9,30
5. Papua: 6,18

WILAYAH	INVESTASI PMDN		KREDIT PERBANKAN		KKREDIT MIKRO KECIL MENENGAH	
	RATA-RATA 2005-2008 (Rp. Miliar)	SHARE (%)	RATA-RATA 2007-2009 (Rp. Miliar)	SHARE (%)	RATA-RATA 2007-2009 (Rp. Miliar)	SHARE (%)
SUMATERA	8.400	31,52	193.749	15,44	117.393	18,79
JAWA-BALI	14.729	55,26	913.352	72,78	408.768	65,43
KALIMANTAN	1.916	7,19	67.483	5,38	33.704	5,40
SULAWESI	1.402	5,26	56.483	4,50	43.281	6,93
NUSA TENGGARA	21	0,08	12.436	0,99	11.971	1,92
MALUKU	0,3	0,00	4.006	0,32	3.523	0,56
PAPUA	185	0,70	7.442	0,59	6.068	0,97
TOTAL	26.654	100	1.254.951	100	624.708	100,00

ALOKASI SUMBERDAYA ANTARWILAYAH

WILAYAH	DANA DEKON + TP		DANA PERIMBANGAN		INVESTASI PMA		INVESTASI PMDN		KREDIT PERBANKAN		KKREDIT MIKRO KECIL MENENGAH	
	RATA-RATA 2005-2009 (Rp. Juta)	SHARE (%)	RATA-RATA 2005-2009 (Rp. Juta)	SHARE (%)	RATA-RATA 2005-2008 (US \$ Juta)	SHARE (%)	RATA-RATA 2005-2008 (Rp. Miliar)	SHARE (%)	RATA-RATA 2007-2009 (Rp. Miliar)	SHARE (%)	RATA-RATA 2007-2009 (Rp. Miliar)	SHARE (%)
SUMATERA	37.213	15,65	62.138	27,65	1.133	11,29	8.400	31,52	193.749	15,44	117.393	18,79
JAWA-BALI	157.630	66,31	78.519	34,94	8.516	84,91	14.729	55,26	913.352	72,78	408.768	65,43
KALIMANTAN	11.721	4,93	30.487	13,57	283	2,82	1.916	7,19	67.483	5,38	33.704	5,40
SULAWESI	15.950	6,71	23.811	10,60	76	0,76	1.402	5,26	56.483	4,50	43.281	6,93
NUSA TENGGARA	5.995	2,52	9.965	4,43	8	0,08	21	0,08	12.436	0,99	11.971	1,92
MALUKU	4.278	1,80	5.889	2,62	7	0,07	0,3	0,00	4.006	0,32	3.523	0,56
PAPUA	4.942	2,08	13.890	6,18	5	0,05	185	0,70	7.442	0,59	6.068	0,97
TOTAL	237.729	100,00	224.698	100,00	10.030	100,00	26.654	100	1.254.951	100	624.708	100,00

Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan BKPM

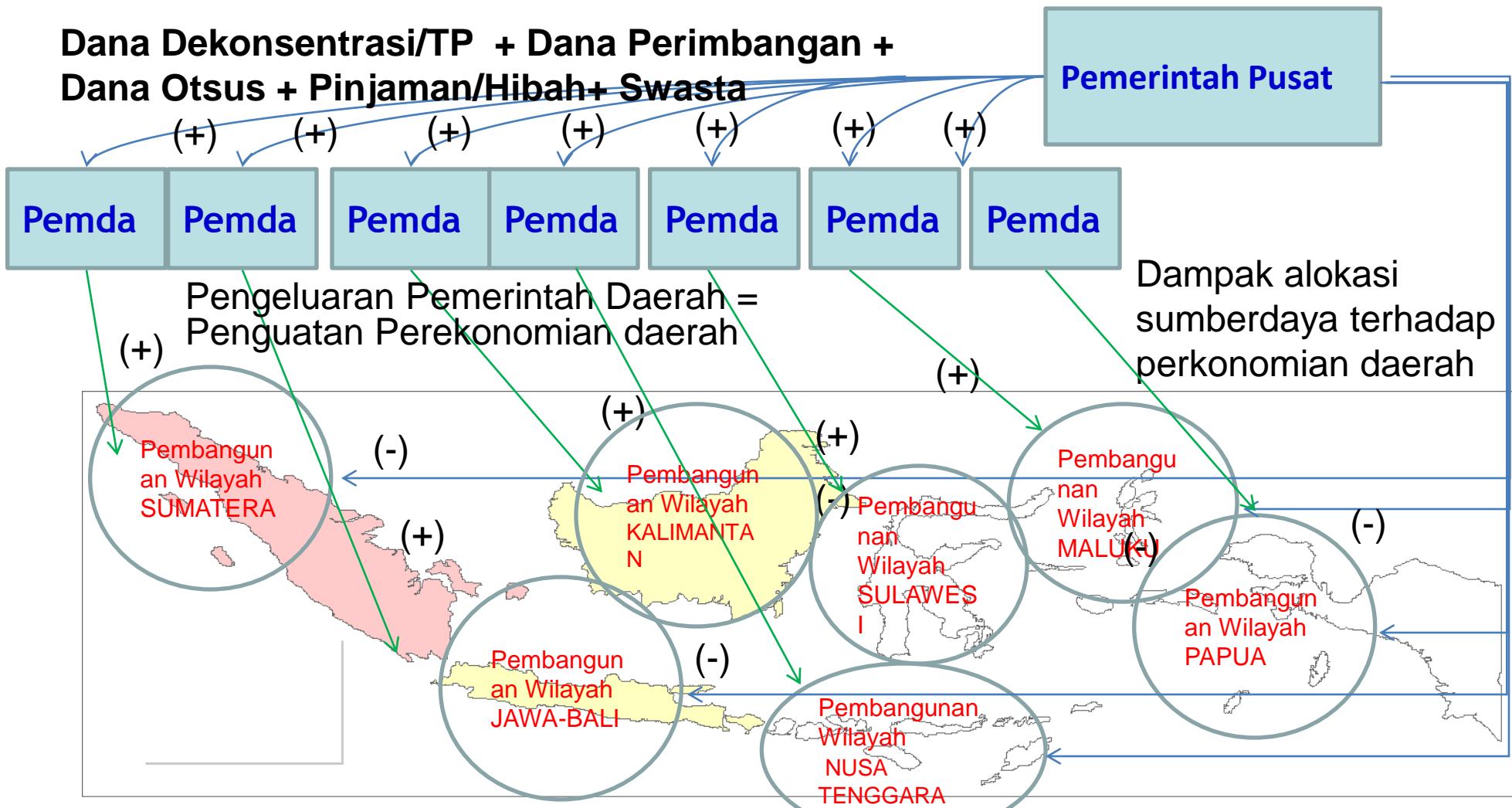
1. Distribusi sumber daya selama kurun waktu 2005-2009 menunjukkan sebagian besar terpusat di Jawa-Bali.
2. Perlu langkah terobosan optimalisasi alokasi sumber daya untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi, dan Sumatera antara lain:
 - (1) "*Location switching*" investasi pemerintah dari Wilayah Jawa-Bali ke Wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi, dan Sumatera.
 - (2) "*Strengthening Public-Private Partnership*" untuk Wilayah Jawa-Bali.
 - (3) "*Promoting Regional Banking*" untuk Wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi, dan Sumatera.

OPTIMALISASI ALOKASI SUMBER DAYA ANTARWILAYAH

Dana Dekonsentrasi/TP + Dana Perimbangan +

Dana Otsus + Pinjaman/Hibah+ Swasta

Pemerintah Pusat



Seluruh alokasi sumber daya didorong untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing daerah

POLA ALOKASI ANGGARAN MENURUT SEKTOR DAN WILAYAH

Saat
Ini

Pola Alokasi pagu yang diharapkan

Kementerian/ Lembaga	Pusat K/L	Wil. 1	Wil. 2	Wil. 3	Wil. 4	Wil. 5	Wil. 6	Wil. 7	Sub total
Kesehatan	A _P %	A ₁ %	A ₂ %	A ₃ %	A ₄ %	A ₅ %	A ₆ %	A ₇ %	TA%
Pendidikan	B _P %	B ₁ %	B ₂ %	B ₃ %	B ₄ %	B ₅ %	B ₆ %	B ₇ %	TB%
Pertanian	C _P %	C ₁ %	C ₂ %	C ₃ %	C ₄ %	C ₅ %	C ₆ %	C ₇ %	TC%
Perindustrian dan Perdagangan	D _P %	D ₁ %	D ₂ %	D ₃ %	D ₄ %	D ₅ %	D ₆ %	D ₇ %	TD%
PU	E _P %	E ₁ %	E ₂ %	E ₃ %	E ₄ %	E ₅ %	E ₆ %	E ₇ %	TE%
...	Z _P %	Z ₁ %	Z ₂ %	Z ₃ %	Z ₄ %	Z ₅ %	Z ₆ %	Z ₇ %	TZ%
Subtotal	TP _P %	TW ₁ %	TW ₂ %	TW ₃ %	TW ₄ %	TW ₅ %	TW ₆ %	TW ₇ %	TT%

Wilayah 1: Papua

Wilayah 2: Maluku

WWayah 3: Nusa Tenggara

Wilayah 4: Sulawesi

Wilayah 2: KaimantanMaluku

WWayah 3: Jaawa-Bali

Wilayah 7: Sumatera

Format RKP dan RAPBN selain pagu menurut K/L juga pagu menurut wilayah

POLA ALOKASI ANGGARAN MENURUT SEKTOR DAN WILAYAH

SKPD	Pusat K/L	Pola Alokasi pagu yang diharapkan							Saat Ini
		Prov. Aceh	Prov. Sumut	Prov. Riau	Prov.	Prov.	Prov.	Prov. Papua	
Kesehatan	A _P %	A ₁ %	A ₂ %	A ₃ %	A ₄ %	A ₅ %	A ₆ %	A ₇ %	TA%
Pendidikan	B _P %	B ₁ %	B ₂ %	B ₃ %	B ₄ %	B ₅ %	B ₆ %	B ₇ %	TB%
Pertanian	C _P %	C ₁ %	C ₂ %	C ₃ %	C ₄ %	C ₅ %	C ₆ %	C ₇ %	TC%
Perindustrian dan Perdagangan	D _P %	D ₁ %	D ₂ %	D ₃ %	D ₄ %	D ₅ %	D ₆ %	D ₇ %	TD%
PU	E _P %	E ₁ %	E ₂ %	E ₃ %	E ₄ %	E ₅ %	E ₆ %	E ₇ %	TE%
...	Z _P %	Z ₁ %	Z ₂ %	Z ₃ %	Z ₄ %	Z ₅ %	Z ₆ %	Z ₇ %	TZ%
Subtotal	TP _P %	TW ₁ %	TW ₂ %	TW ₃ %	TW ₄ %	TW ₅ %	TW ₆ %	TW ₇ %	TT%

Format RKP dan RAPB selain pagu menurut K/LD juga pagu menurut Provinsi

KESERASIAN PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH

Fungsi	Lokasi (Provinsi, Kota/ Kabupa- ten)	Jenis Pelayanan/ Sektor dan Komo-ditas Utama	Strategi dan Arah Pengem- bangan	Bidang	K/L	Program/ Kegiatan Prioritas	Sasar an	Indika tor	Target		Alokasi Dasar Program					
									2015	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
PKN																
PKW																
PKSN																

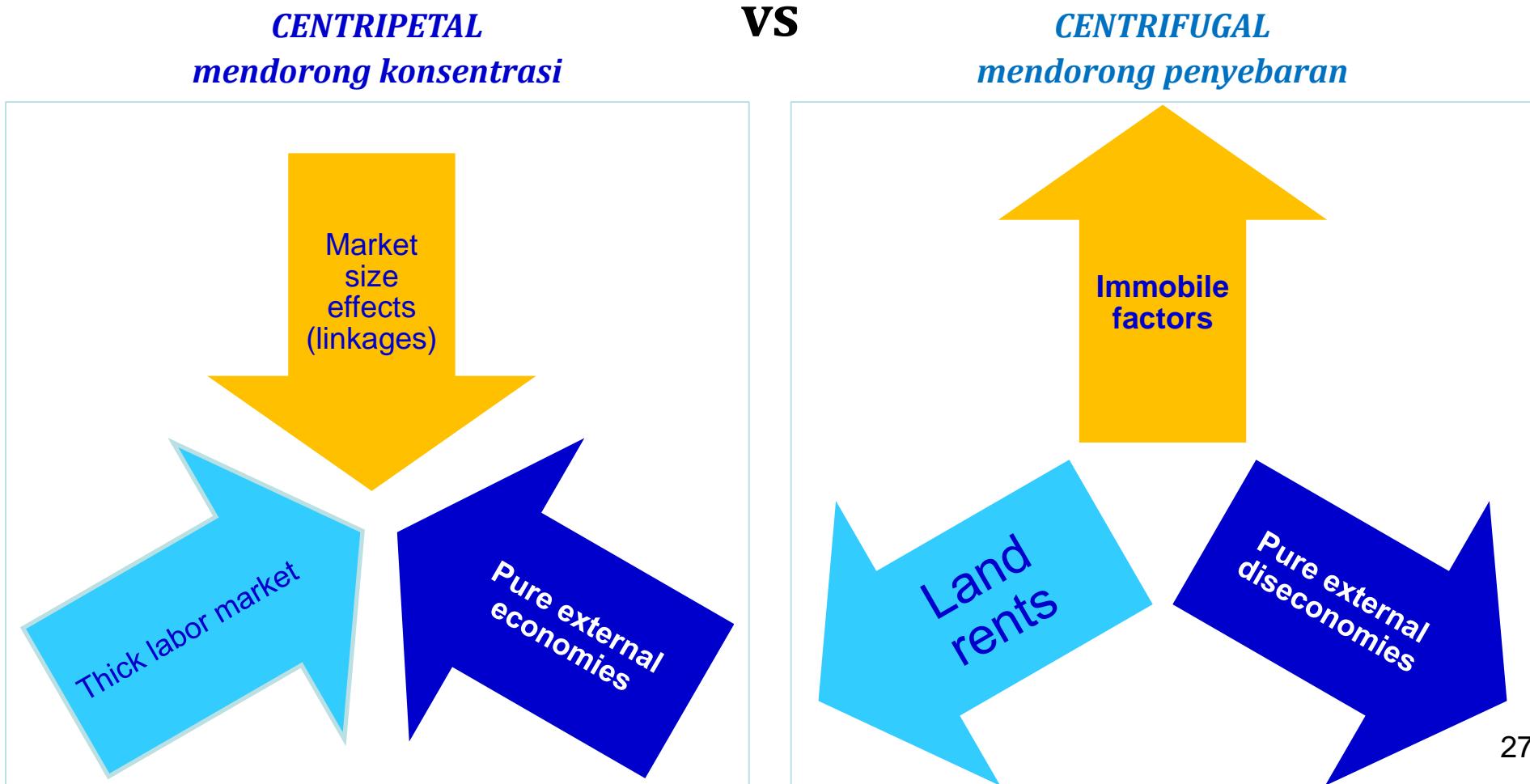
*) Wilayah: Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa-Bali dan Sumatera

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah wilayah yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan internasional, pendorong percepatan pembangunan daerah sekitar, serta pusat jasa, pengolahan, simpul transportasi yang melayani beberapa provinsi dan nasional antara lain: kawasan cepat tumbuh dan strategis, KAPET, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Kawasan Ekonomi Khusus.
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah wilayah pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten antara lain: Kota Terpadu Mandiri,
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah wilayah yang terletak di kawasan yang memiliki nilai strategis politik pertahanan keamanan dan keamanan antara lain: daerah perbatasan, pulau terluar, daerah tertinggal, daerah rawan bencana, dan daerah khusus lainnya.

SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH

POLA PERUBAHAN EKONOMI WILAYAH

- Pola pemasaran investasi dan perdagangan antardaerah merupakan hasil tegangan antara gaya centripetal dan centrifugal



POLA PERUBAHAN EKONOMI WILAYAH

- Daerah yang maju akan tetap menarik investasi dan tenaga kerja selama keuntungan aglomerasi (*agglomeration economies*) lebih besar dari kerugiannya
 - *Market size effect*: adanya keterkaitan antarsektor, *transport costs* yang rendah dan *economies of scale*
 - *Labor market*: di kota besar lebih mudah menemukan tenaga kerja spesialis, pekerja juga lebih mudah menemukan bidang pekerjaan sesuai keahliannya
 - *Externalities*: menyebarnya informasi, teknologi & inovasi sesama pelaku usaha dalam satu klaster
- Sebaliknya, penyebaran investasi dan tenaga kerja dari kota-kota utama akan terjadi karena:
 - *Immobile factors*: tanah, SDA pertambangan, tempat wisata
 - *Land rents*: mahalnya harga tanah di kota-kota besar pusat pertumbuhan
 - Eksternalitas negatif: polusi, kemacetan
- Infrastruktur yg merata, pelayanan publik universal, dan diferensiasi (keunikan) menjadi kunci pengembangan daerah tertinggal.

ORIENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH

- Orientasi Manusia (*human development*):
 - Pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*)
 - Pemberdayaan (*empowerment*)
 - Modal sosial (*social capital*)
 - Pemenuhan hak dasar rakyat (*right based approach*)
- Orientasi Wilayah (*regional development*)
 - Pusat-pusat Pertumbuhan (*growth centre approach*)
 - Keterkaitan antarwilayah (*interregional linkages*)
 - Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development approach*)
- Orientasi Petumbuhan dan Pemerataan
 - Pertumbuhan untuk pemerataan (*growth for equity*)
 - Pertumbuhan melalui pemerataan (*growth through equal distribution*)
 - Pemerataan untuk pertumbuhan (*equal distribution for growth*)
 - Pemerataan melalui pertumbuhan (*equity through growth*)

PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN

- Penguatan daya saing dengan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa dan Sumatera (sebagai pusat perekonomian nasional) → Risiko: dominasi Jawa dan kesenjangan antarwilayah terus terjadi.
- Penguatan daya saing dengan menciptakan dan menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di **Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua** → Risiko: pertumbuhan sedikit melambat.
- Percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terdepan untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan dan keterisolasi --> Risiko: -
- Pilihan: Pengamanan pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa dan Sumatera, penciptaan dan perluasan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa dan percepatan daerah tertinggal, kawasan perbatasan dan pulau terdepan

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Pendekatan Pengembangan Wilayah :

- Pemenuhan hak dasar rakyat (right based approach)

vs

- Pengembangan wilayah (spatial-based approach)

- Petumbuhan (growth oriented)

- *Regional Integration*

SWP

1970an

KIP
1970an

NUDS
1984

KAPET
KEPPRES 89/1996
P3KT
1992
PPK
1998

KEK
UU 39/2009

KAPET
PP 26/2007

PNPM Mandiri
2006

PNPM ManPerkot

PNPM ManPerdes

□ PNPM-P2DTK

□ PNPM- PPIP

□ PNPM-PISEW/RISE

P2KP
2004

MP3EI
Perpres 32/2011

MP3KI
2012



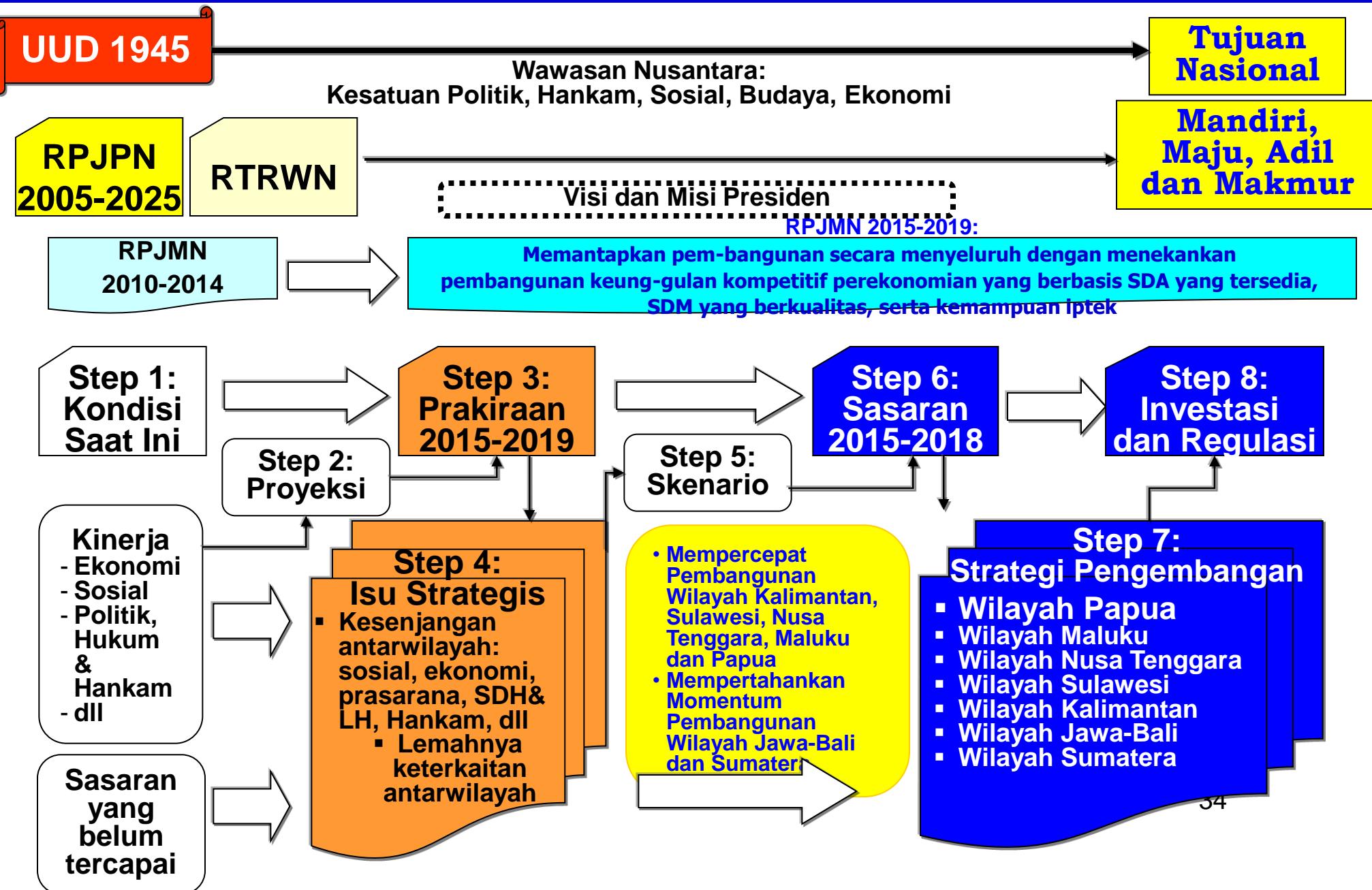
KOMBINASI PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA

Skenario	Kesempatan Kerja Tinggi		Kesempatan Kerja Rendah	
	Jawa-Bali dan Sumatera (KBI)	Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (KTI)	Jawa-Bali dan Sumatera (KBI)	Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (KTI)
Pertumbuhan Tinggi				
Jawa-Bali dan Sumatera (KBI)	Industri pengolahan dan Jasa		Industri padat modal dan teknologi	
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (KTI)		Industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, perdagangan		Industri Pertambangan
Pertumbuhan Rendah				
Jawa-Bali dan Sumatera (KBI)	Perikanan, pertanian, pariwisata		Stagnasi	
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (KTI)		Perkebunan dan perikanan		Stagnasi

Sektor dan komoditas unggulan daerah → produktivitas, efisiensi dan daya saing → sinkronisasi kebijakan pertanian, perikanan, kehutanan, industri dan perdagangan

**KERANGKA PIKIR
PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
PEMBANGUNAN BERDIMENSI
KEWILAYAHAN**

KERANGKA PIKIR

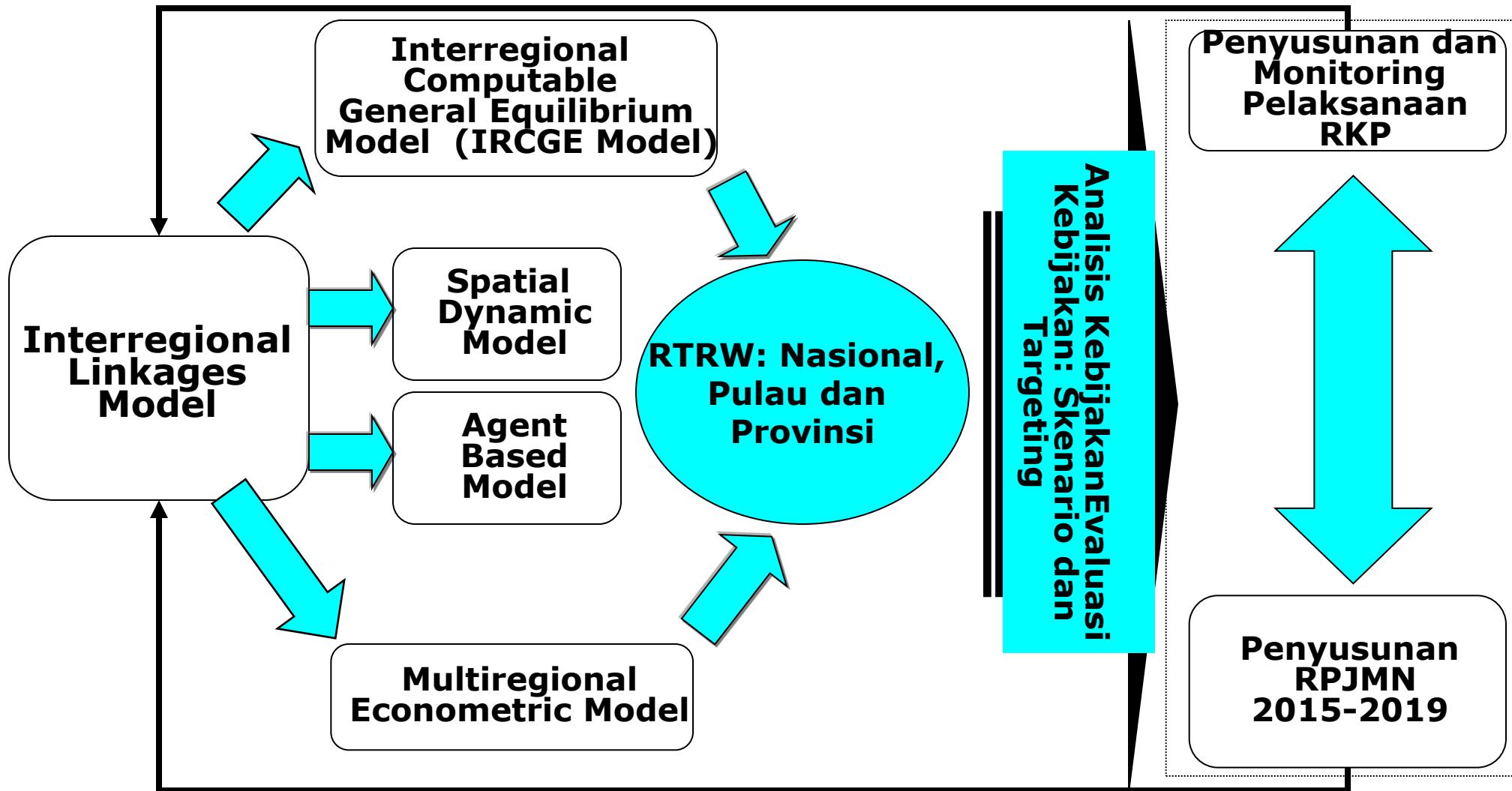


PENGEMBANGAN WILAYAH



PENGEMBANGAN MODEL PERENCANAAN WILAYAH

Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja



Investasi: Pemerintah, Swasta dan Perbankan

MODEL KETERKAITAN WILAYAH

1. Pendekatan Kuantitatif

- 1) Model yang bersifat deterministik:** Model Input-Output Regional, Model Linier Programming, Model Interregional CGE
- 2) Model yang bersifat stokastik:** Model Ekonometrika

2. Pendekatan Kualitatif

- 1) Model Analisis Perilaku Rumah Tangga**
- 2) Model Pemberdayaan Masyarakat**
- 3) Model Analisis Daya Dukung Lingkungan (*carrying capacity*)**

3. Pendekatan Tata Ruang/Spasial

- 1) Model GIS**
- 2) Model Jaringan Infrastruktur**

KESERASIAN RENCANA PEMBANGUNAN, RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA SEKTOR



ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Kategori: Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Tujuan : meningkatkan efisiensi dan produktivitas (daya saing nasional)

Sasaran: meningkatnya produksi, produktivitas, mutu, dan penerimaan ekspor

Wilayah	Arah	Fokus	Peran Dominan
1. Papua	Perintisan dan pengembangan pusat pertumbuhan baru → KAPET KORIDOR EKONOMI	Peningkatan SDM, penyediaan prasarana, Penataan kelembagaan, manajemen SDA+LH	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
2. Maluku	Perintisan dan pengembangan pusat pertumbuhan baru → KAPET KORIDOR EKONOMI	Peningkatan SDM, penyediaan prasarana, Penataan kelembagaan , manajemen SDA+LH	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
3. Nusa Tenggara	Perintisan dan pengembangan pusat pertumbuhan baru → KAPET KORIDOR EKONOMI	Peningkatan SDM, penyediaan prasarana, Penataan kelembagaan, manajemen SDA+LH	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
4. Sulawesi	Pengembangan pusat pertumbuhan baru dan pemantapan pusat pertumbuhan yang ada → KAPET, KPBPP, dan KEK, KORIDOR EKONOMI	Peningkatan SDM, penyediaan prasarana, Penataan kelembagaan, manajemen SDA+LH	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
5. Kalimantan	Perintisan dan pengembangan pusat pertumbuhan baru, dan pemantapan pusat pertumbuhan yang ada → KAPET dan KEK, KORIDOR EKONOMI	Peningkatan SDM, penyediaan prasarana, Penataan kelembagaan, manajemen SDA+LH	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
6. Jawa-Bali	Pengembangan dan Perluasan (jaringan) pusat pertumbuhan → KAPET dan KEK, KORIDOR EKONOMI	Penataan kelembagaan, jaringan prasarana dan sistem informasi, manajemen SDA+LH	Pemerintah Provinsi dan Swasta
7. Sumatera	Pemantapan pusat pertumbuhan baru, serta pengembangan dan perluasan pusat pertumbuhan yang ada → KAPET, KPBPP dan KEK, KORIDOR EKONOMI	Penyediaan prasarana, penataan kelembagaan dan sistem informasi, manajemen SDA+LH	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Swasta

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Kategori: Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Tujuan : mengembangkan pusat pengolahan, jasa, dan simpul transportasi wilayah

Sasaran: meningkatnya produksi dan arus perdagangan antardaerah

Wilayah	Arah	Fokus	Peran Dominan
1. Papua	Perintisan dan pengembangan pusat pengolahan, jasa, dan simpul transportasi	Peningkatan SDM, peningkatan prasarana, penataan kelembagaan, manajemen SDA+LH	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
2. Maluku	Perintisan dan pengembangan pusat pengolahan, jasa, dan simpul transportasi	Peningkatan SDM, peningkatan prasarana, penataan kelembagaan , manajemen SDA+LH	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
3. Nusa Tenggara	Perintisan dan pengembangan pusat pengolahan, jasa, dan simpul transportasi	Peningkatan SDM, peningkatan prasarana, penataan kelembagaan, manajemen SDA+LH	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
4. Sulawesi	Pengembangan dan pemantapan pusat pengolahan, jasa, dan simpul transportasi	Peningkatan SDM, peningkatan prasarana, penataan kelembagaan, manajemen SDA+LH	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
5. Kalimantan	Perintisan, pengembangan dan pemantapan pusat pengolahan, jasa, dan simpul transportasi	Peningkatan SDM, peningkatan prasarana, penataan kelembagaan, manajemen SDA+LH	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
6. Jawa-Bali	Pengembangan dan perluasan jaringan pusat pengolahan, jasa, dan simpul transportasi	Penataan kelembagaan, jariangan prasarana transportasi dan sistem informasi, manajemen SDA+LH	Pemerintah Provinsi dan Swasta
7. Sumatera	Pemantapan, pengembangan dan perluasan pusat pengolahan, asa, dan simpul transportasi	Peningkatan prasarana, penataan kelembagaan dan sistem informasi, manajemen SDA+LH	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Swasta

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Kategori: Pusat Kawasan Nasional (PKSN)

Tujuan : mengamankan kawasan yang memiliki nilai strategis politik, pertahanan, keamanan dan keselamatan

Sasaran: terpeliharanya suasana aman dan terjaganya keutuhan wilayah NKRI

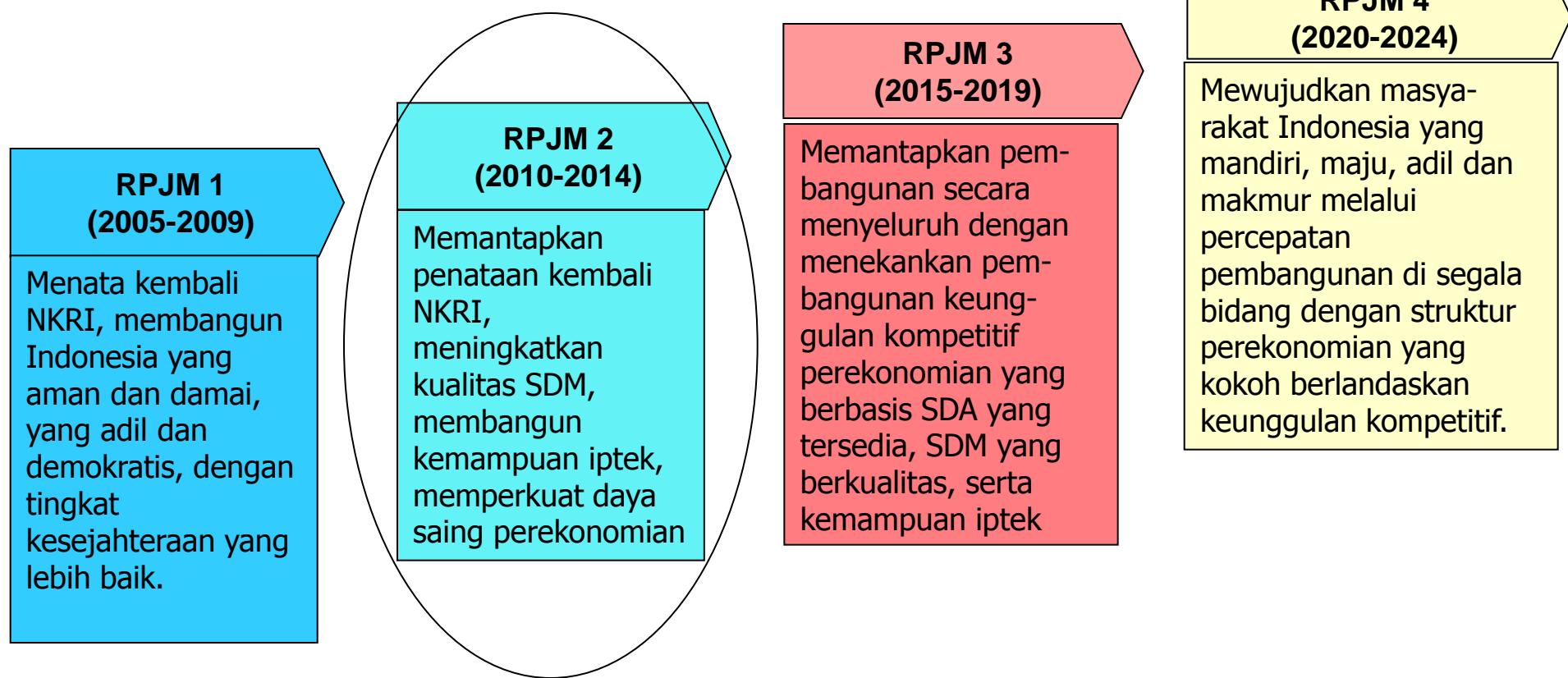
Wilayah	Arah	Fokus	Peran Dominan
1. Papua	Pengembangan daerah tertinggal, daerah perbatasan, pulau terluar dan daerah rawan bencana	Peningkatan SDM, penyediaan prasarana transportasi, penataan kelembagaan, manajemen SDA+LH	Pemerintah Pusat dan Provinsi
2. Maluku	Pengembangan daerah tertinggal, daerah perbatasan, pulau terluar dan daerah rawan bencana	Peningkatan SDM, penyediaan prasarana transportasi, Penataan kelembagaan , manajemen SDA+LH	Pemerintah Pusat dan Provinsi
3. Nusa Tenggara	Pengembangan daerah tertinggal, daerah perbatasan, pulau terluar dan daerah rawan bencana	Peningkatan SDM, penyediaan prasarana transportasi, Penataan kelembagaan, manajemen SDA+LH	Pemerintah Pusat dan Provinsi
4. Sulawesi	Pengembangan daerah tertinggal, daerah perbatasan, pulau terluar dan daerah rawan bencana	Peningkatan SDM, penyediaan prasarana transportasi, penataan kelembagaan, manajemen SDA+LH	Pemerintah Pusat dan Provinsi
5. Kalimantan	Pengembangan daerah tertinggal, daerah perbatasan, pulau terluar dan daerah rawan bencana	Peningkatan SDM, penyediaan prasarana transportasi, penataan kelembagaan, manajemen SDA+LH	Pemerintah Pusat dan Provinsi
6. Jawa-Bali	Pengembangan daerah tertinggal dan daerah rawan bencana	Penataan kelembagaan, jaringan prasarana transportasi dan sistem informasi, manajemen SDA+LH	Pemerintah Provinsi dan Swasta
7. Sumatera	Pengembangan daerah tertinggal, daerah perbatasan, pulau terluar dan daerah rawan bencana	Penyediaan prasarana transportasi, penataan kelembagaan dan sistem informasi, manajemen SDA+LH	Pemerintah Pusat, Provinsi dan Swasta

PKSN termasuk daerah perbatasan, pulau terluar, daerah rawan bencana, dan daerah khusus lainnya.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH

TAHAPAN RPJPN 2005-2025

VISI RPJPN 2005-2025 : INDONESIA YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL

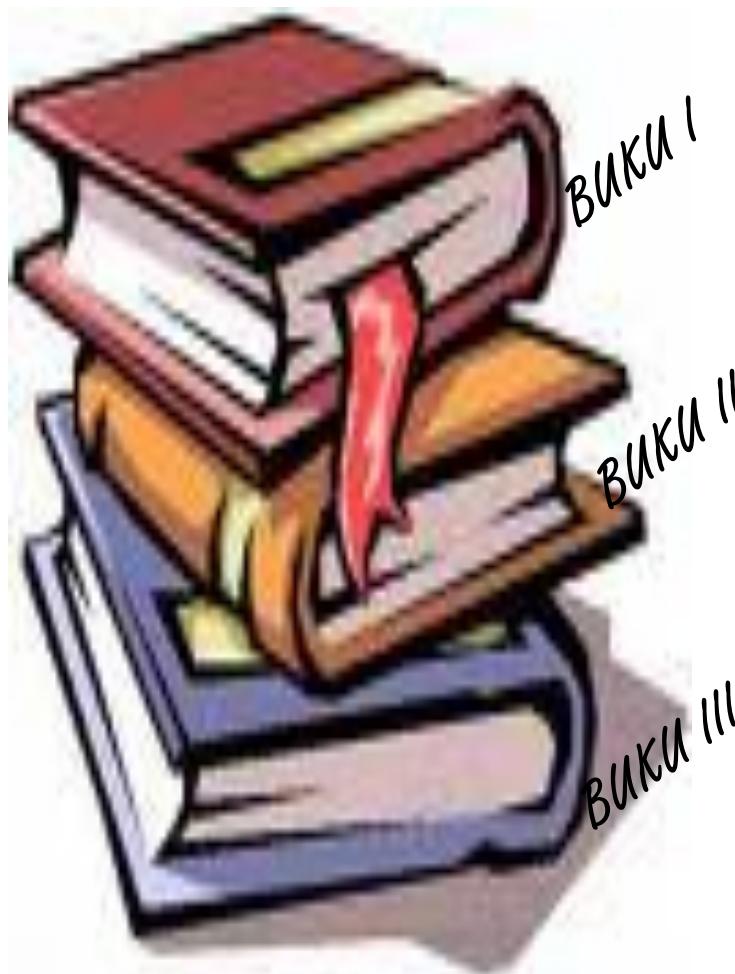


RPJMN 2010-2014 TELAH DITETAPKAN MELALUI PERPRES NO.5 TAHUN 2010

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH 2005-2025

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menyebutkan bahwa visi pembangunan nasional adalah **terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.**
- Salah satu misi pembangunan jangka panjang yang terkait dengan pembangunan wilayah adalah **mewujudkan pemerataan pembangunan dan mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.**
- Selain itu, arahan RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN 2010-2014 menyebutkan bahwa pembangunan diarahkan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

DOKUMEN RPJMN 2010-2014



- **BUKU I : PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS NASIONAL**
 - Tema : Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan
 - Visi, Misi, Agenda, Prioritas Nasional, dan Kerangka Makro
- **BUKU II : STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG**
 - Sinergi pembangunan antarbidang
 - Strategi lintas bidang dan mainstreaming: 9 bidang (sosbud, ekonomi, iptek, politik, hukum dan aparatur, hankam, infrastruktur, wilayah dan tataruang, lingkungan hidup)
- **BUKU III : STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH**
 - Sinergi pembangunan pusat – daerah dan antardaerah
 - Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah (Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua)

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH RPJMN 2010-2014

STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH 2010-2014

Strategi pengembangan wilayah :

1. mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali;
2. meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian domestik;
3. meningkat daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah;
4. mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan bencana; serta
5. mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.

Arah dan Strategi kebijakan pengembangan wilayah mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Arah Pengembangan Wilayah Laut.

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH 2010-2014

Berdasarkan arahan umum pembangunan wilayah RPJPN 2005-2025, dan prioritas dalam RPJMN 2010-2014, maka arah pengembangan wilayah ditujukan untuk:

- (1) mendorong terwujudnya kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan secara **adil dan merata di seluruh wilayah**;
- (2) mendorong pengembangan dan pemerataan pembangunan wilayah secara terpadu sebagai **kesatuan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya** dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungannya;
- (3) menciptakan **keseimbangan pemanfaatan ruang** antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya dalam satu ekosistem pulau dan perairannya;
- (4) menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam satu **kesatuan wilayah kepulauan**;

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH 2010-2014

- (4) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan nasional;
- (5) memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan;
- (6) menciptakan kesatuan dan keutuhan wilayah darat, laut dan udara sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (7) mengurangi gangguan keamanan; dan
- (8) menghapuskan potensi konflik sosial;
- (9) mewujudkan seluruh wilayah nusantara sebagai satu kesatuan sosial, budaya, ekonomi, politik dan pertahanan dan keamanan yang semakin maju, produktif dan berkembang sebagai landasan utama dalam menyambut terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH RPJMN 2010-2014

Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali

Meningkatkan keterkaitan antarwilayah (konektivitas)

Mengembangkan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah

Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan bencana

Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan

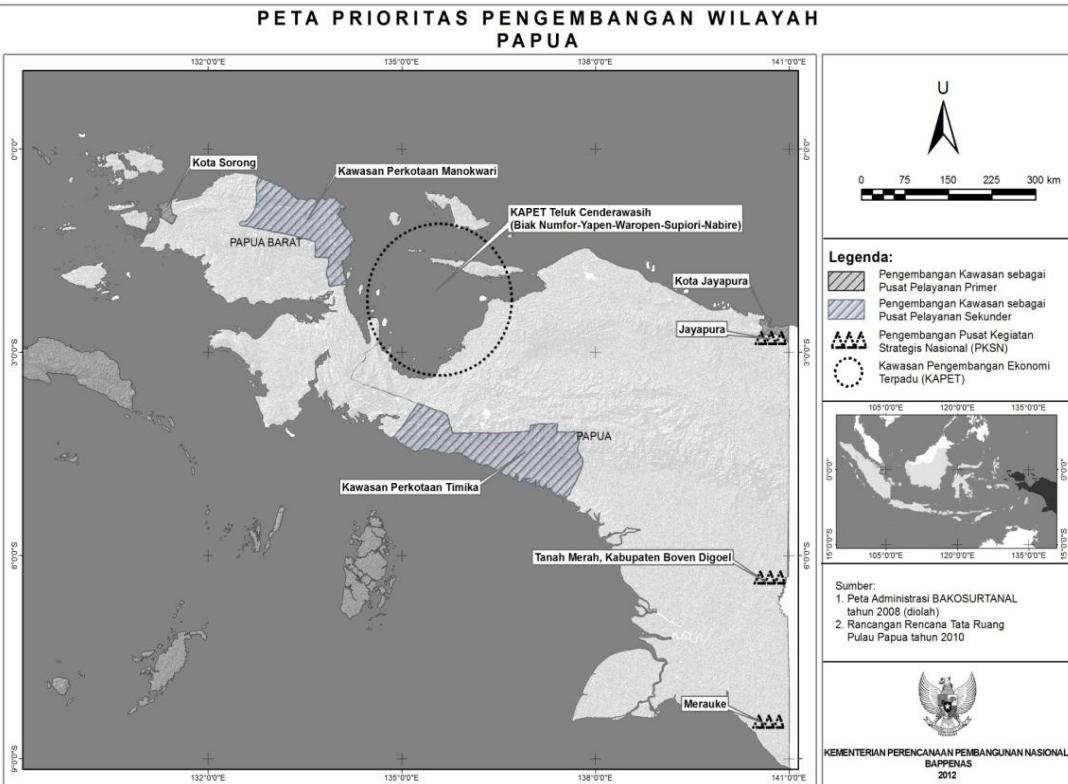
Strategi Pembangunan Nasional

*Pro Growth,
Pro Jobs,
Pro Poor dan
Pro Environment*

Keterkaitan target nasional dan daerah:

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Pengurangan Kemiskinan
3. Pengurangan Pengangguran

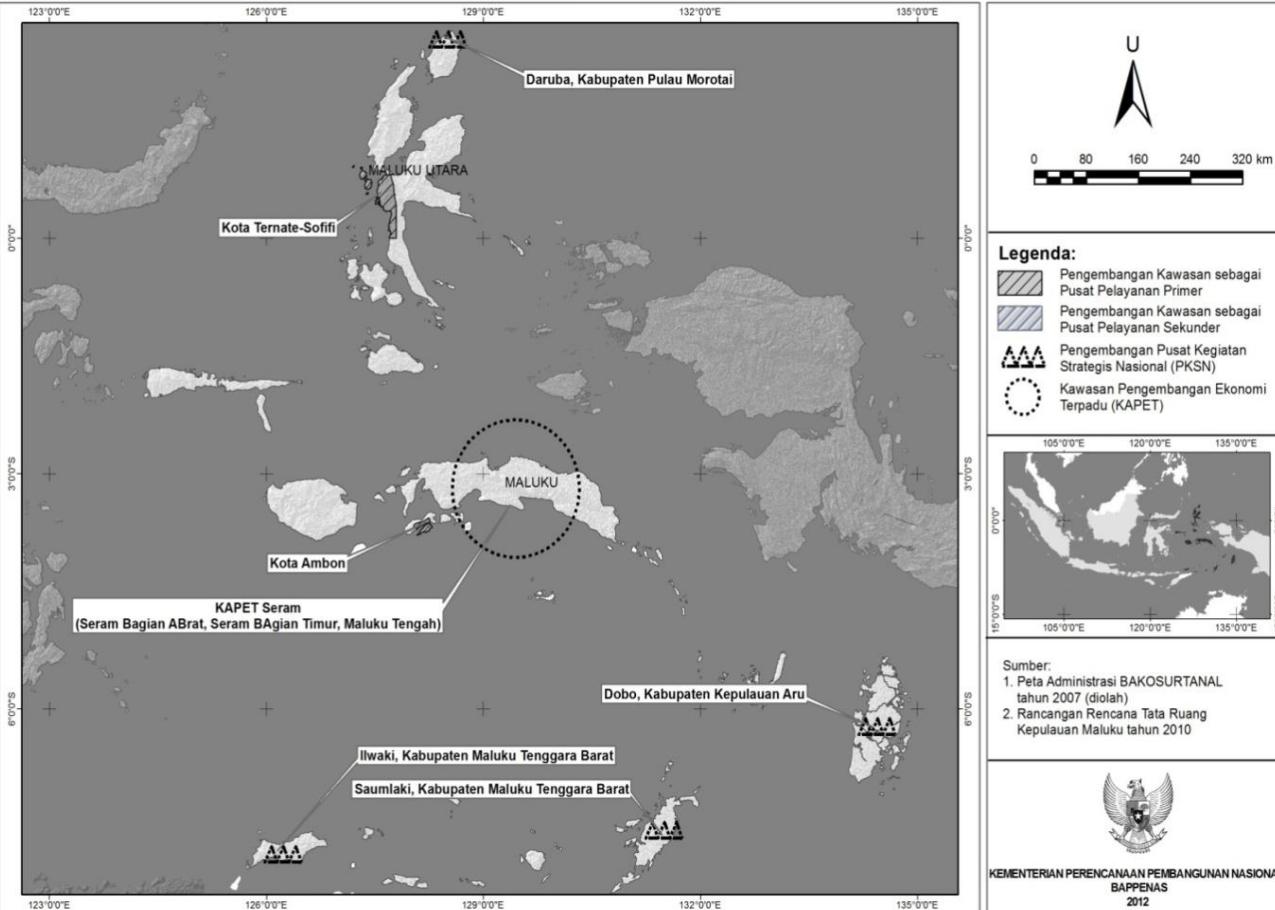
ARAH DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH 2013: PAPUA



Arah Pengembangan Wilayah	Prioritas Pengembangan
<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan mutu sumber daya manusia; Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perkebunan; Peningkatan produktivitas dan nilai tambah peternakan; Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perikanan; dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau. <p>Dalam rangka Percepatan Pembangunan Papua prioritas kebijakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya, Lani Jaya, Paniai, Nabire, Tolikara, Pegunungan Bintang (Papua) dan Kabupaten Fak Fak dan Manokwari (Papua Barat). 2. Pengembangan peternakan di Kawasan Pegunungan Tengah, Bomberai, dan Kebar; 3. Penanggulangan kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan menyediakan permodalan UMKM usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat melalui PNPM Mandiri, KUR, dan Respek. 4. Pengembangan ekonomi rakyat di Kabupaten Jayapura, Waropen, Yapen, Nabire, Mappi, Keerom, Asmat, Merauke, dan Mimika (Papua) dan Kabupaten Sorong Selatan, Kaimana, Fak fak, dan Teluk Bintuni (Papua Barat); 5. Pengembangan industri pengolahan sagu rakyat; 6. Peningkatan pelayanan pendidikan gratis sampai SMU hingga menjangkau seluruh distrik dan kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat; 7. Peningkatan pelayanan kesehatan gratis sampai SMU hingga menjangkau seluruh distrik dan kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat; 8. Pengembangan infrastruktur dasar di seluruh Papua dan Papua Barat terutama pengembangan sumber energi alternatif terbarukan (PLTMH, PLTS) dan pabrik semen di Timika dan Manokwari; 9. Pemihakan terhadap masyarakat asli Papua di seluruh Papua dan Papua Barat melalui pemberian kuota khusus bagi putra-putri asli Papua berupa kuota kepada siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan tinggi, kuota menjadi anggota TNI/Polri dan sekolah Akademi Militer dan Akademi Kepolisian, serta pendirian sekolah kebidanan/keperawatan, sekolah kepamongprajaan, dan sekolah pendidikan keguruan. 	

ARAH DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH 2013: MALUKU

PETA PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU



Arah Pengembangan Wilayah

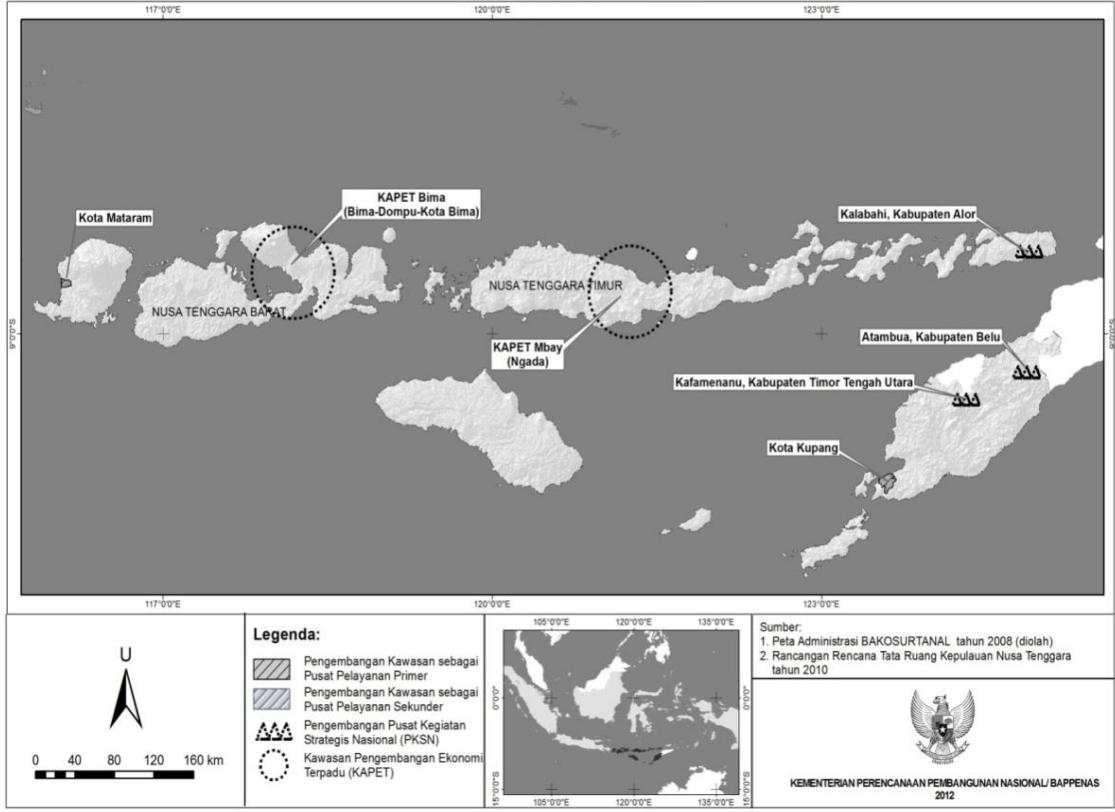
- 1.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perikanan;
- 2.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perkebunan;
- 3.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah peternakan
- 4.Peningkatan produktivitas dan nilai tambahpariwisata; dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau.

Prioritas Pengembangan

- 1.Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Seram;
- 2.Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Daruba, Dobo, Saumlaki, dan Ilwaki;
- 3.Pengembangan infrastruktur jalan
- 4.Pengembangan Pelabuhan Ambon, Buli, dan Tobelo;
- 5.Pengembangan produksi dan pengolahan produk pertanian, perkebunan, dan Perikanan;
- 6.Pengembangan Pariwisata Bahari di Maluku.

ARAH DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH 2013: NUSA TENGGARA

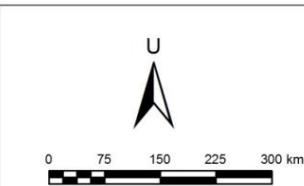
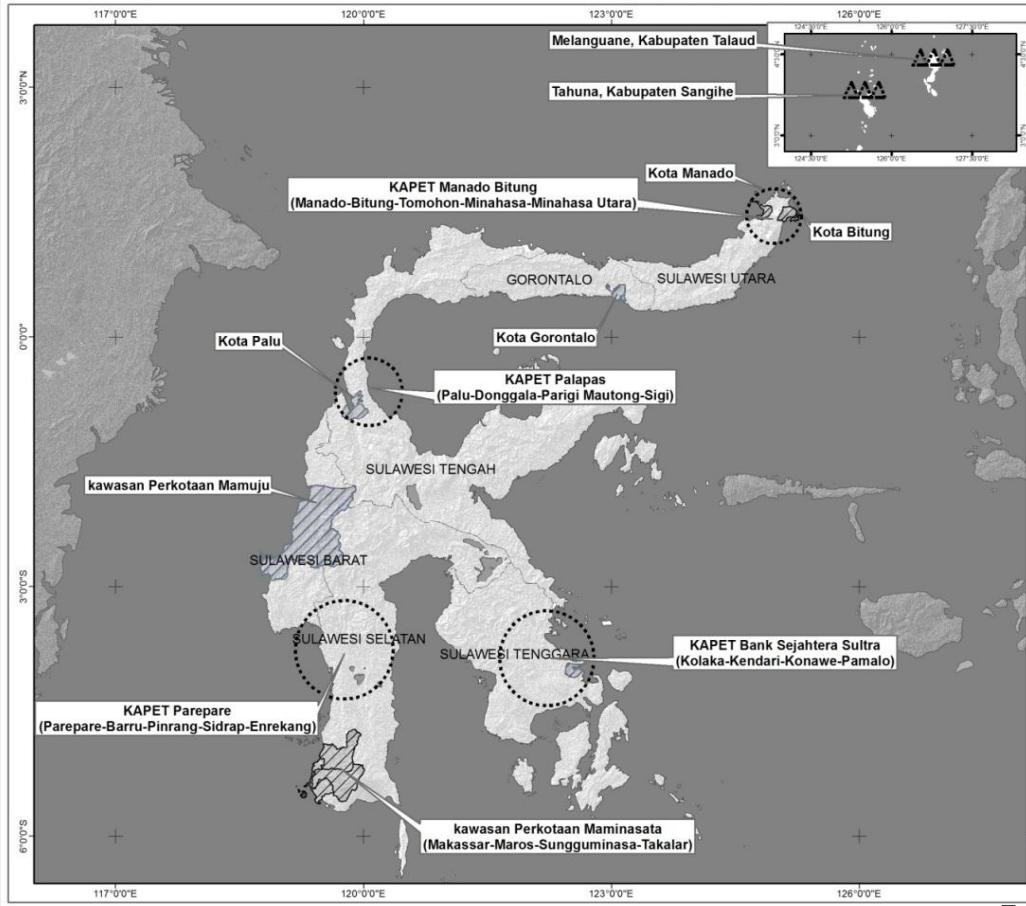
PETA PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA



Arah Pengembangan Wilayah	Prioritas Pengembangan
<p>1.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perkebunan;</p> <p>2.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah peternakan;</p> <p>3.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perikanan dan pariwisata; dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau</p>	<p>1.Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bima dan Mbay;</p> <p>2.Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Atambua, Kafamenanu, dan Kalabahi;</p> <p>3.Pengembangan infrastruktur jalan dan pelabuhan penyeberangan;</p> <p>4.Pengembangan kawasan pariwisata;</p> <p>5.Pengembangan pengairan dan irigasi.</p> <p>Dalam rangka percepatan pembangunan Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan prioritas:</p> <p>1.Pengembangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pusat produksi dan pengolahan komoditas unggulan jagung dan kakao, pusat pembibitan dan produksi sapi dan cendana, pusat produksi dan pengolahan hasil-hasil perikanan, rumput laut; serta pusat produksi dan pengolahan garam.</p> <p>2.Pengembangan pariwisata melalui pengembangan desa wisata terutama pengembangan Kawasan Wisata Alam Komodo dan seluruh lokasi potensial Kawasan Wisata Alam, Wisata Budaya dan Wisata minat khusus.</p> <p>3.Pengembangan infrastruktur yang penghubung antarkota, pulau-pulau, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil, dan pulau-pulau terpencil dan terdepan/terluar sebagai berikut: (1) jaringan jalan lintas Nusa Tenggara Timur; (2) jaringan prasarana dan transportasi penyeberangan antar-pulau; (3) jaringan listrik dan irigasi.</p> <p>4.Pemantapan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan kesejahteraan, dengan prioritas sebagai berikut: (1) pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan; dan (2) pengembangan kawasan perbatasan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional melalui pengembangan pemukiman eks Timor-Timur</p>

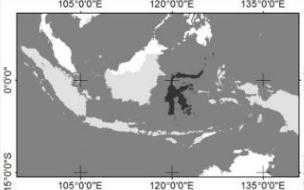
ARAH DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH 2013: SULAWESI

PETA PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI



Legenda:

- Pengembangan Kawasan sebagai Pusat Pelayanan Primer
- Pengembangan Kawasan sebagai Pusat Pelayanan Sekunder
- Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)



Sumber:

- Peta Administrasi BAKOSURTANAL tahun 2007 (diolah)
- Rancangan Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi tahun 2010


KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BAPEPAM-LK
2012

Arah Pengembangan Wilayah

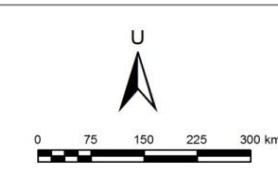
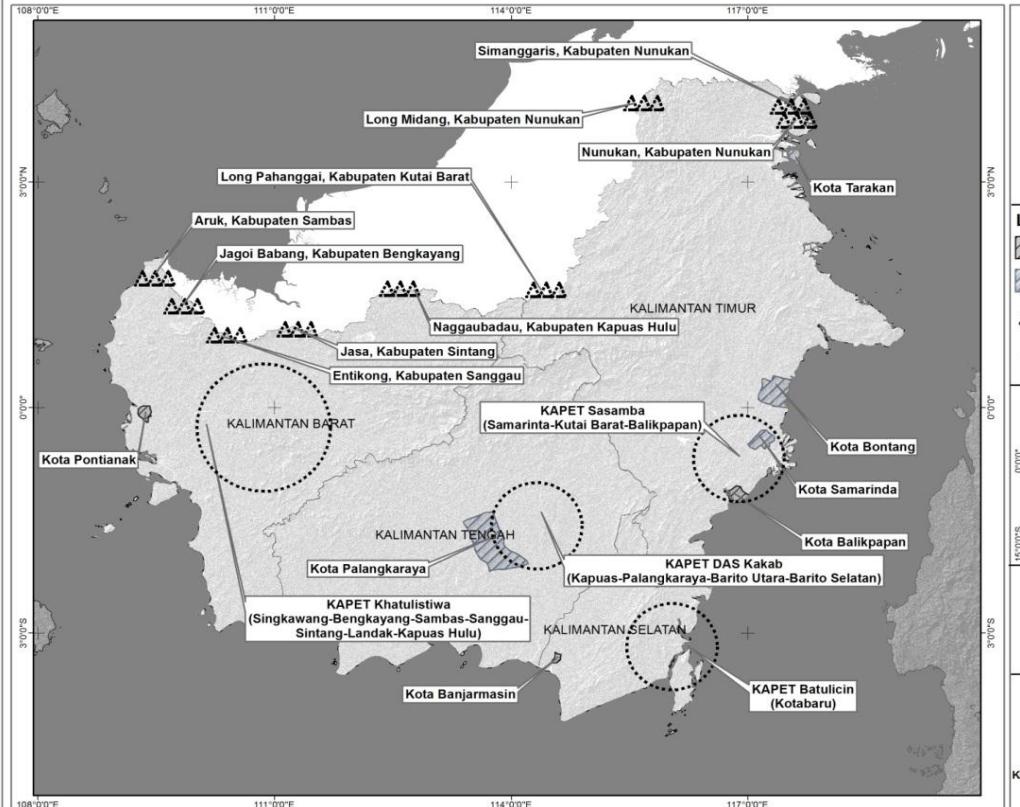
1. Lumbung pangan nasional
2. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan
3. Pengembangan bioenergi
4. Peningkatan dan perluasan perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf internasional.
5. Pengembangan jaringan pengairan dan irigasi.

Prioritas Pengembangan

1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Manado-Bitung, Palapas, Pare-pare, dan Bank Sejahtera Sultra;
2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Melanguane dan Tahuna;
3. Pengembangan infrastruktur Jalan;
4. Pengembangan produktivitas dan mutu pertanian;
5. Pengembangan jaringan pengairan dan irigasi.

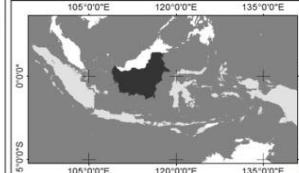
ARAH DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH 2013: KALIMANTAN

PETA PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN



Legenda:

- [Hatched Box] Pengembangan Kawasan sebagai Pusat Pelayanan Primer
- [Dashed Box] Pengembangan Kawasan sebagai Pusat Pelayanan Sekunder
- [Triangle] Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- [Circle] Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)



Sumber:

1. Peta Administrasi BAKOSURTANAL tahun 2008 (diolah)
2. Rancangan Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan tahun 2010

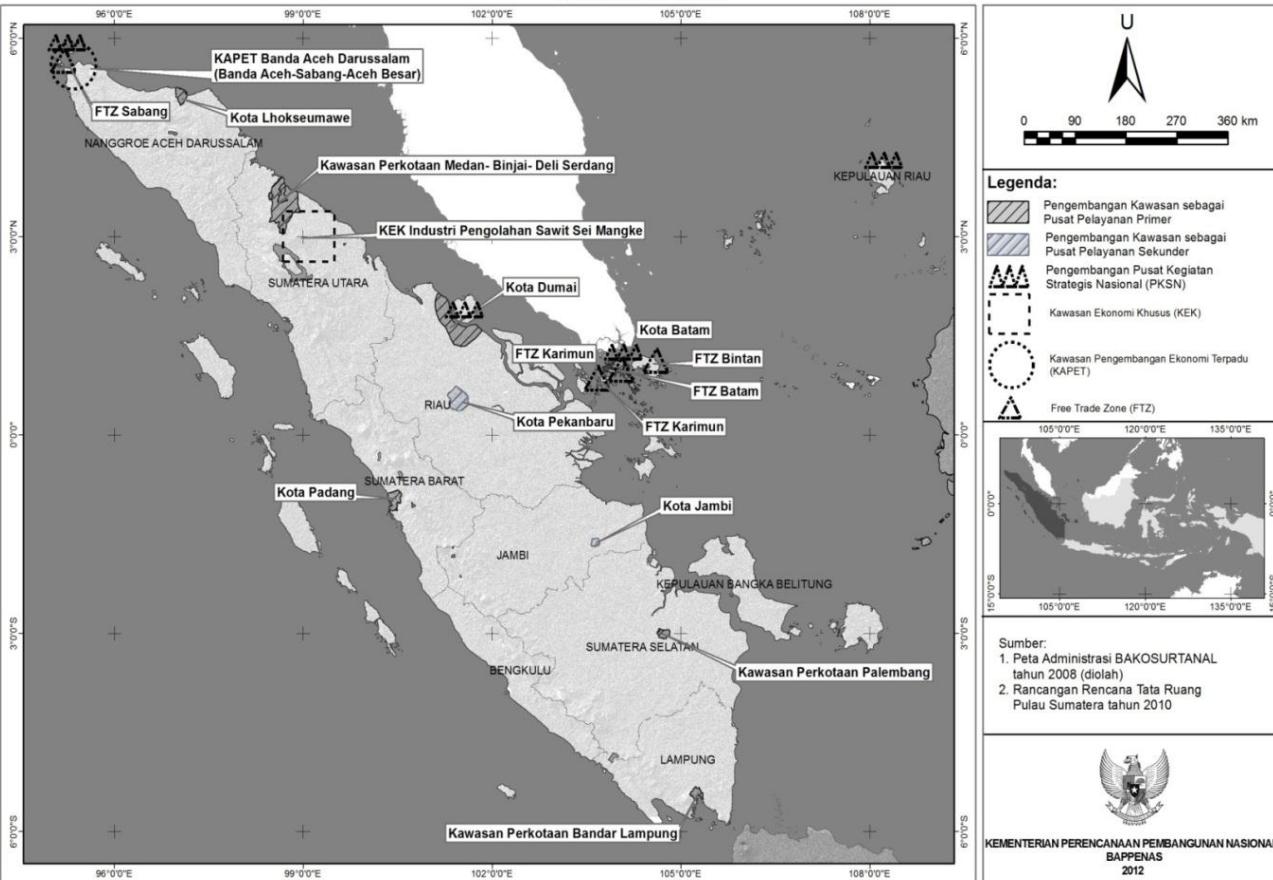


Arah Pengembangan Wilayah

1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil hutan;
2. Peningkatan nilai tambah hasil pertambangan dan berfungsi sebagai lumbung energi nasional dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan
3. Pengembangan Infrastruktur jalan dan jembatan;
4. Pengembangan mutu dan produksi pertanian
5. Pengembangan jaringan pengairan dan irigasi

ARAH DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH 2013: SUMATERA

PETA PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA



Arah Pengembangan Wilayah	Prioritas Pengembangan
1.Pusat produksi dan industri pengolahan hasil pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pengolahan Sawit Sei Mangkei; 2. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Banda Aceh Darussalam; 3. Pengembangan mutu dan produksi pertanian di Aceh, Bengkulu, Riau, Lampung, dan Kepulauan Riau; 4. Pengembangan pusat industri dan pengolahan pertanian di Sumatera Utara dan Lampung ; 5. Pengembangan sarana irigasi di Aceh, Kepulauan Riau, Riau, dan Sumatera Selatan; 6. Pengembangan infrastruktur penghubung berupa jalan di Aceh, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara; 7. Pengembangan Jalan Tol di Riau dan Sumatera Utara; 8. Pengembangan infrastruktur kereta api di Aceh dan Sumatera Barat; 9. Pengembangan Bandara Sultan Thaha, Bandara Raja Haji Fisabilillah, Bandara Tanjung Pandan, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin, dan Bandara Sultan Syarif Kasim II, 10. Pengembangan Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Tanjung Api-Api, Pelabuhan Merak-Bakaheuni, dan Pelabuhan Panjang, 11. Pengembangan pariwisata di Bangka Belitung,
2.Lumbung energi nasional	
3.Pusat perdagangan dan pariwisata	

ARAH DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH 2013: JAWA - BALI



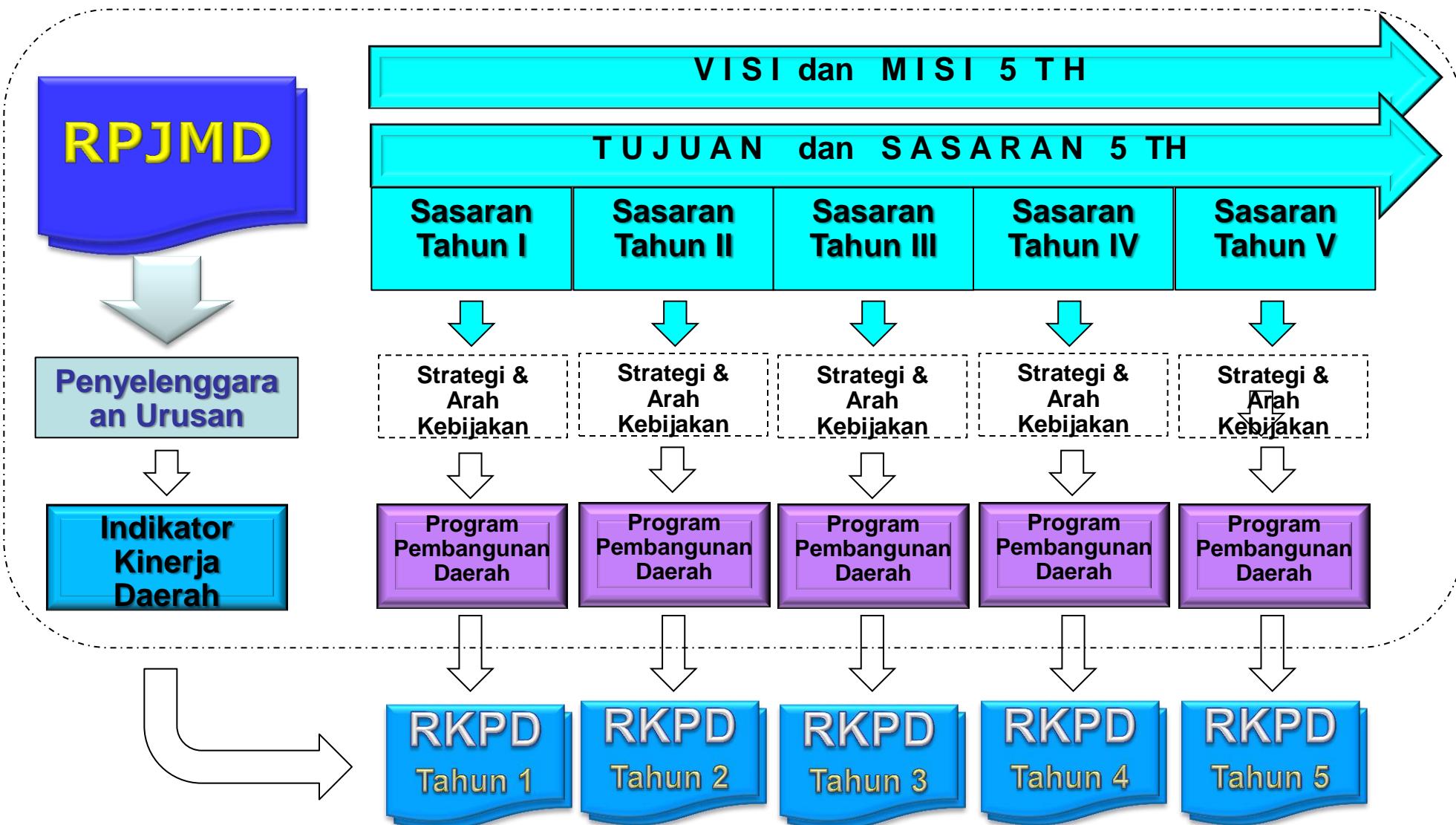
Arah Pengembangan Wilayah	Prioritas Pengembangan
1. Lumbung pangan nasional,	1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung.
2. Pengembangan industri pengolahan	2. Pengembangan Pertanian di Bali, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
3. Penguatan interaksi perdagangan	3. Pengembangan Pengairan dan Irigasi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
4. Peningkatan mutu pelayanan jasa dan pariwisata bertaraf internasional, dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan.	4. Pengembangan Infrastruktur jalan di Bali, Jalan Lintas Utara Jawa, dan Ruas Semarang- Bawen-Yogyakarta
	5. Pengembangan jalan tol Tanjung Priok, Cisumda, dan Mantingan-Solo-Kertosono.
	6. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok, Pamanukan, Taddan, Pasean, dan Branta.
	7. Pengembangan infrastruktur perkeretaapian di jabodetabek (elektrifikasi) dan <i>double-track</i> lintas utara jawa

TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

HUBUNGAN RPJPD DAN RPJMD



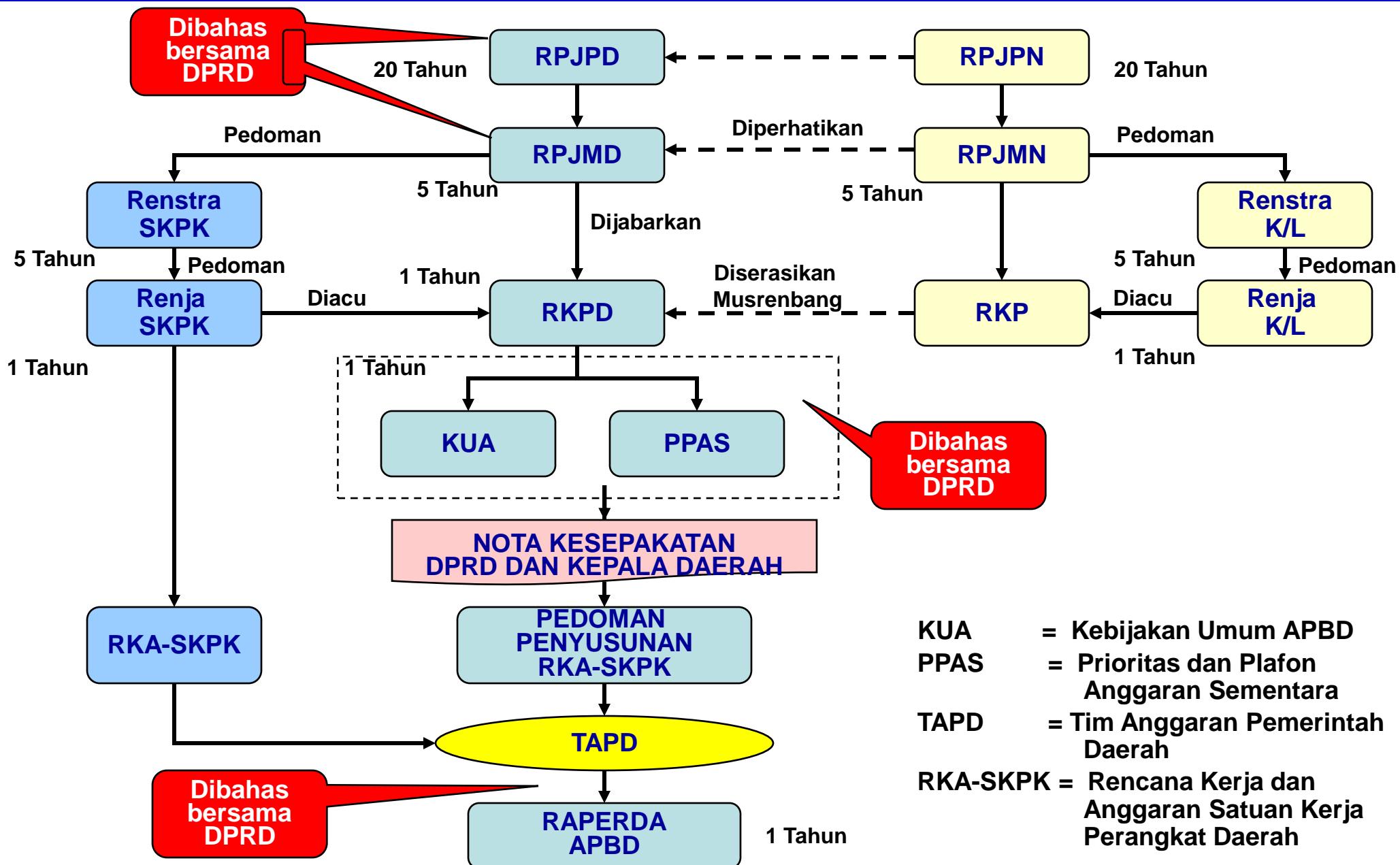
HUBUNGAN RPJMD DAN RKPD



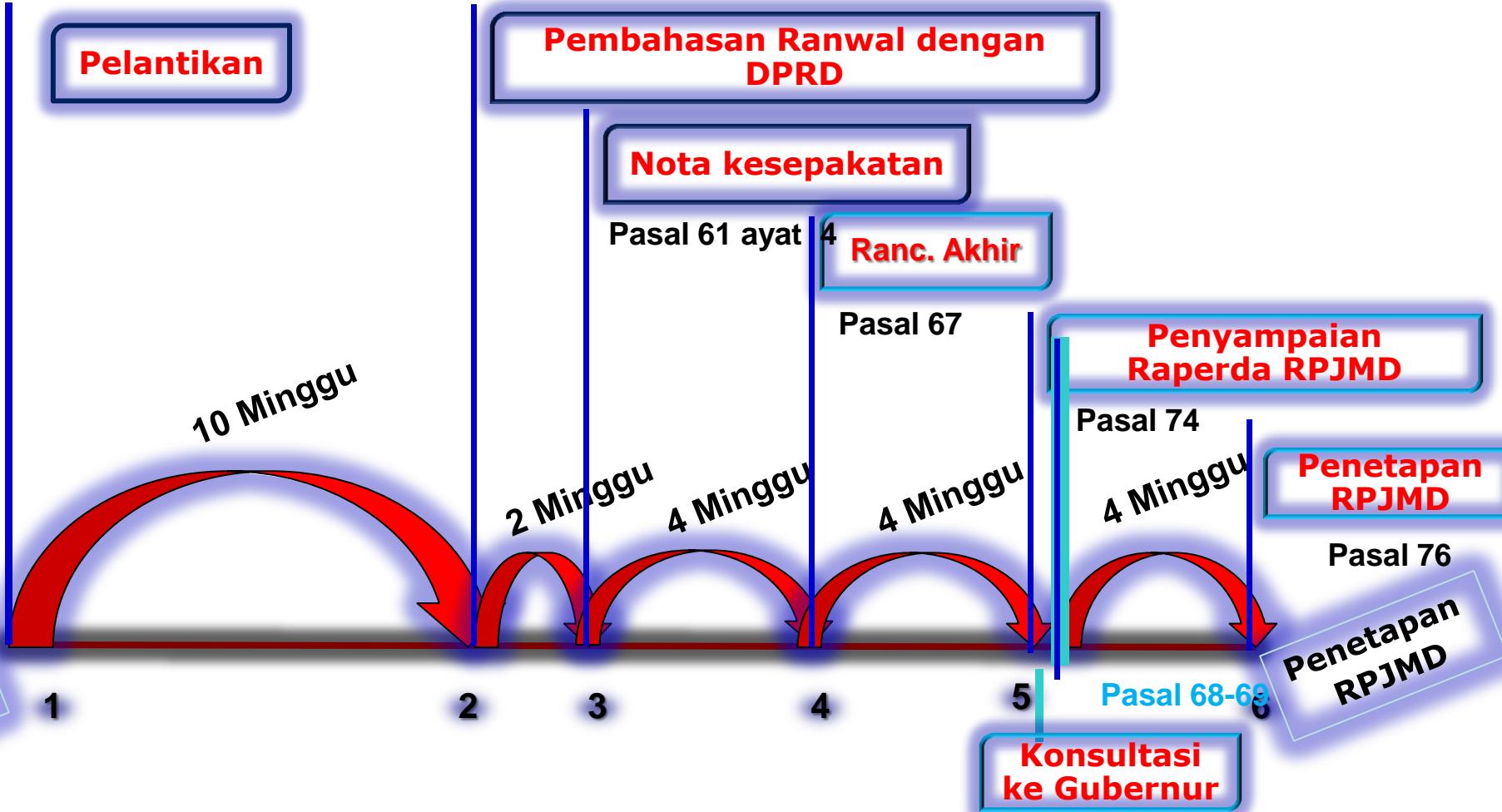
HUBUNGAN ANTARA RPJP, RPJM, RENCANA STRATEGIS DAN RENCAÑA ANGGARAN



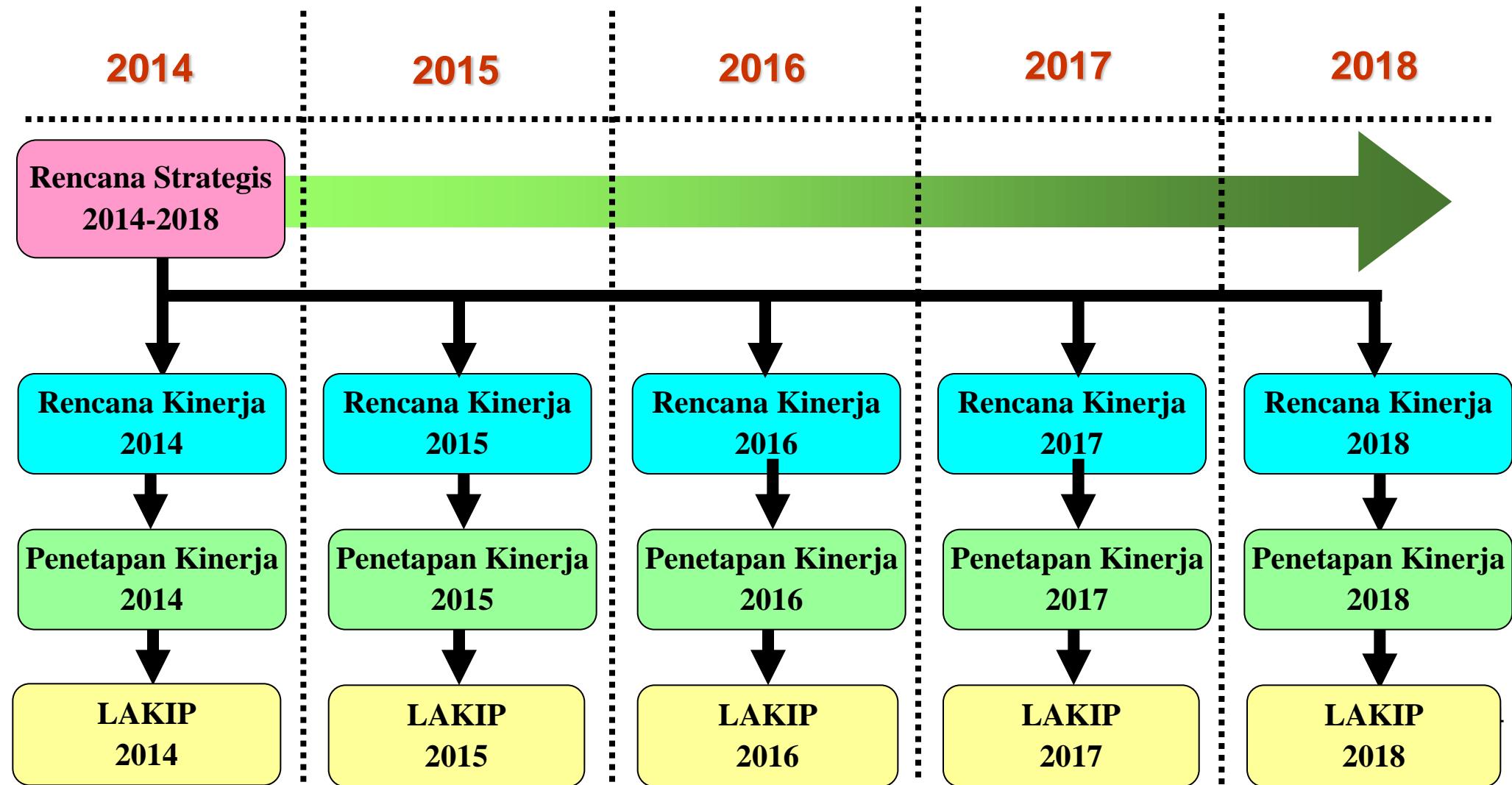
PROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD DAN APBD (UU 17/2003, UU 25/2004, UU 32/2004, PP 8/2008)



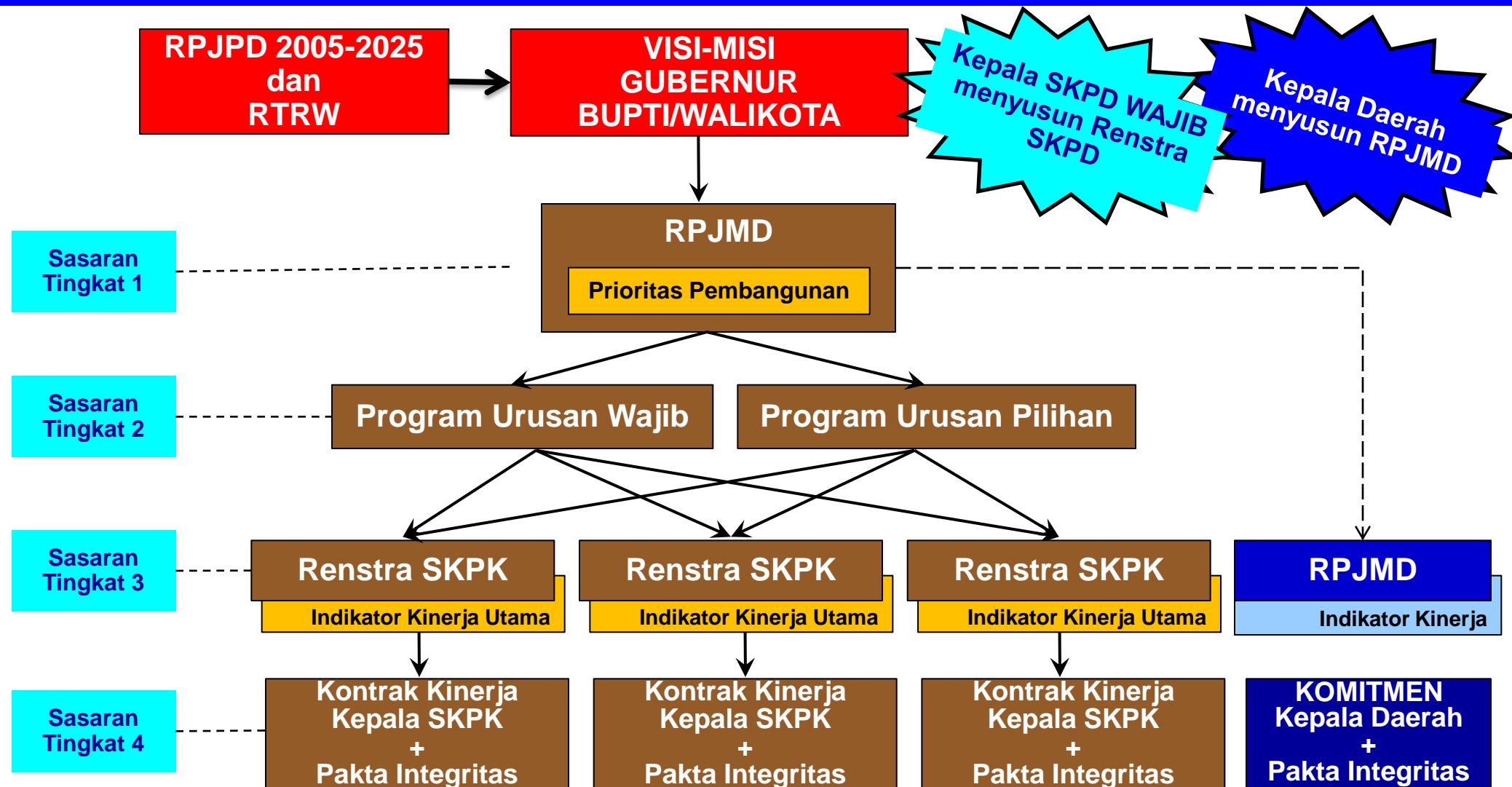
TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD



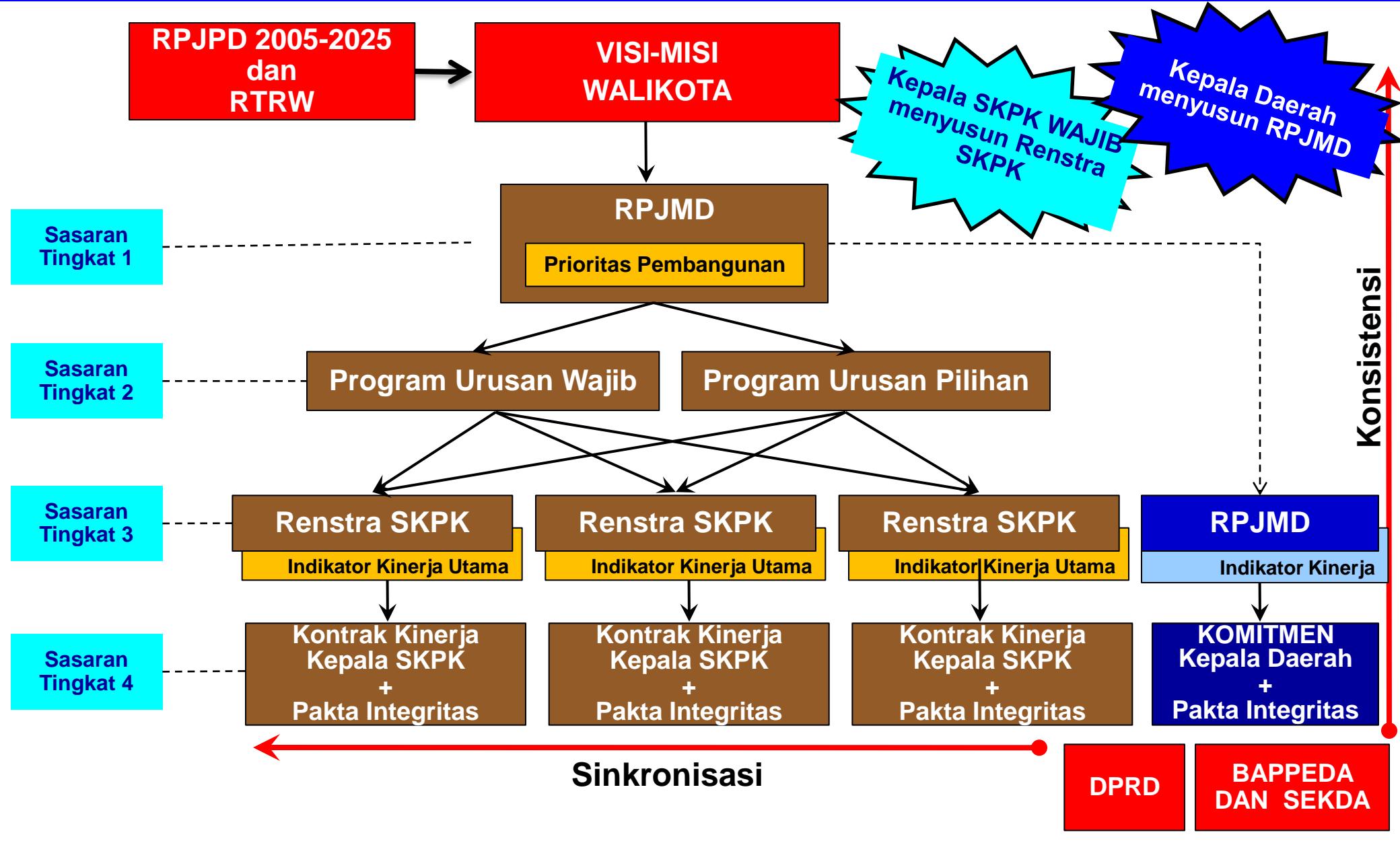
HUBUNGAN ANTARDOKUMEN DALAM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



HIERARKI PERENCANAAN BERBASIS KINERJA



SINKRONISASI DAN KONSISTENSI



REVITALISASI DAN REORIENTASI MUSRENBANG

FOKUS DAN PRIORITAS LOKASI

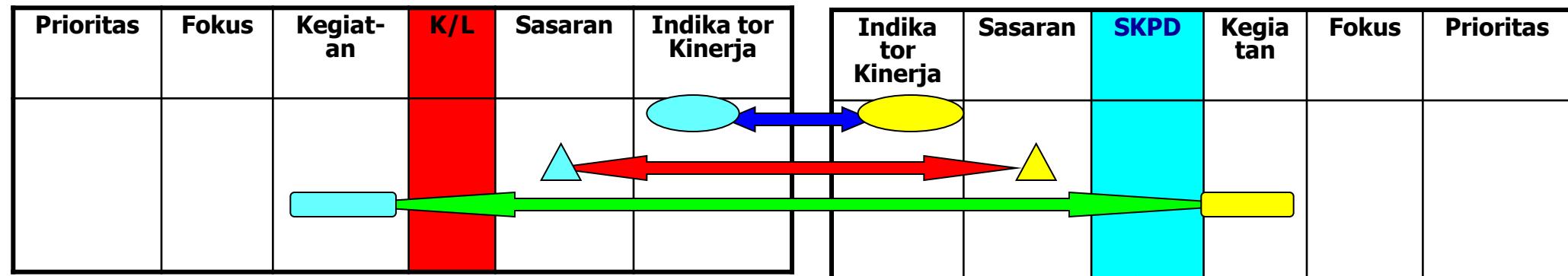
RPJMN DAN RKP



SINKRONISASI RKP, RKPD, RENJA K/L DAN RENJA SKPD

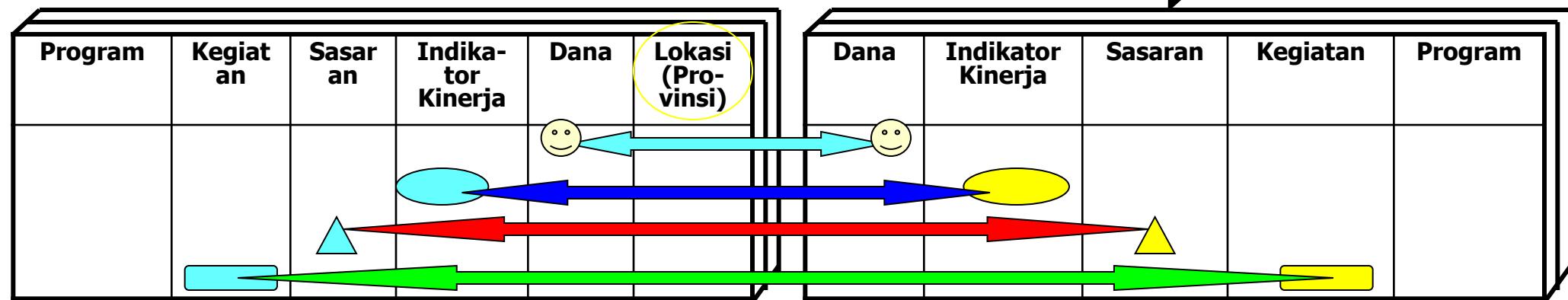
RKP

RKPD PROVINSI



RENJA K/L

RENJA SKPD

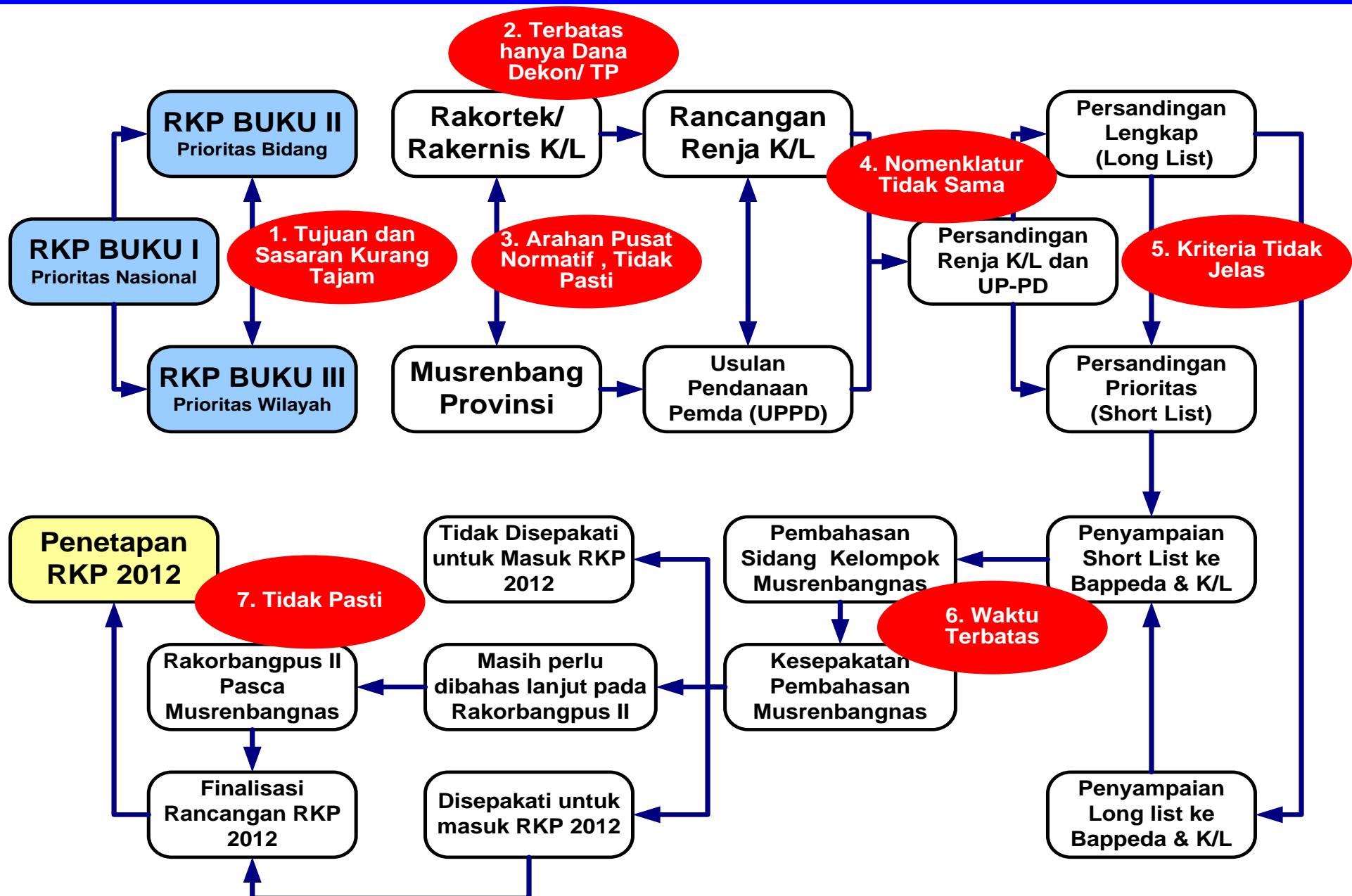


Konsistensi RKP dan RKPD terutama kegiatan, sasaran dan indikator kinerja.

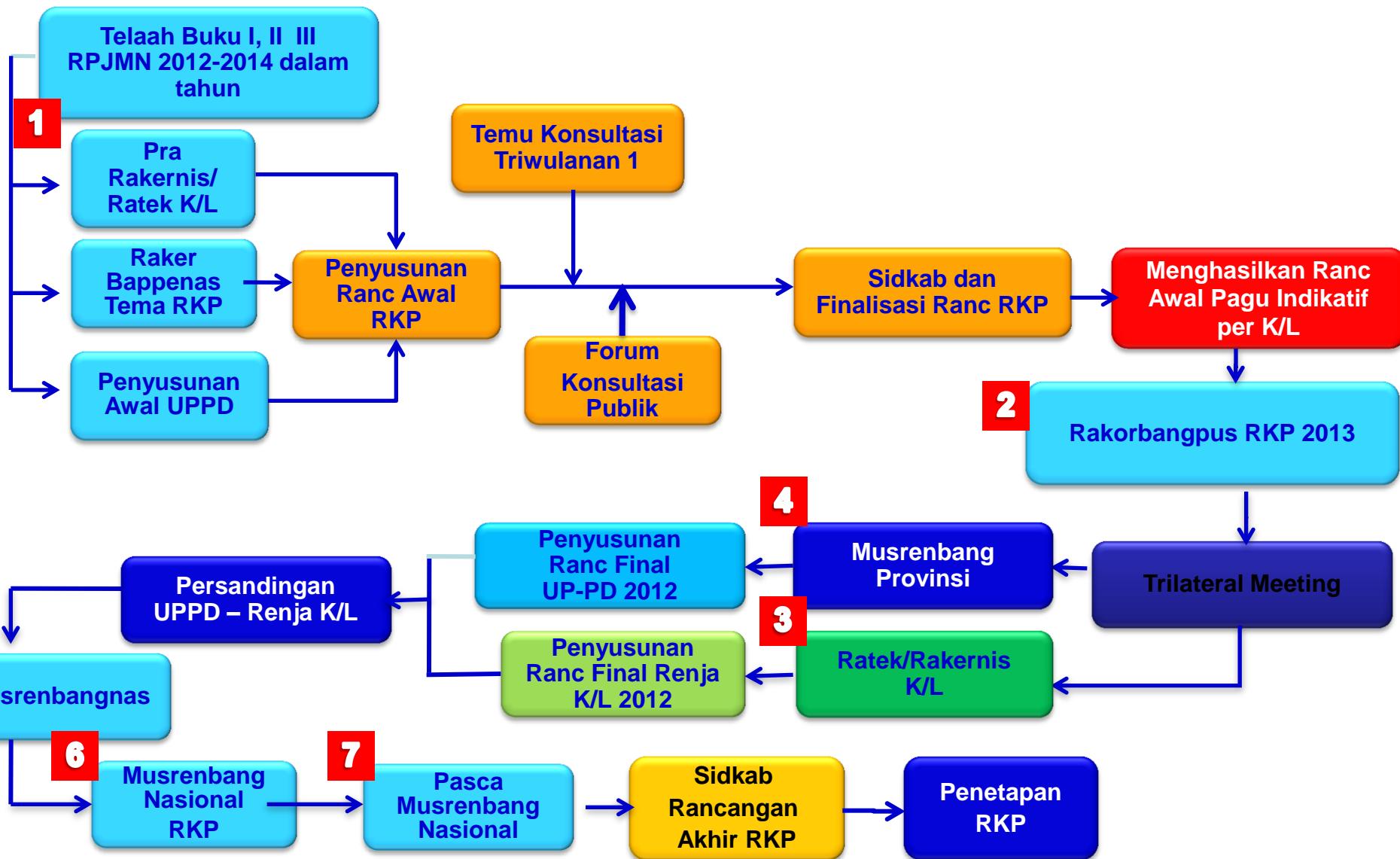
RKP= Σ Renja K/L (kegiatan, sasaran dan indikator kinerja)

RKPD= Σ Renja SKPD (kegiatan, sasaran dan indikator kinerja)

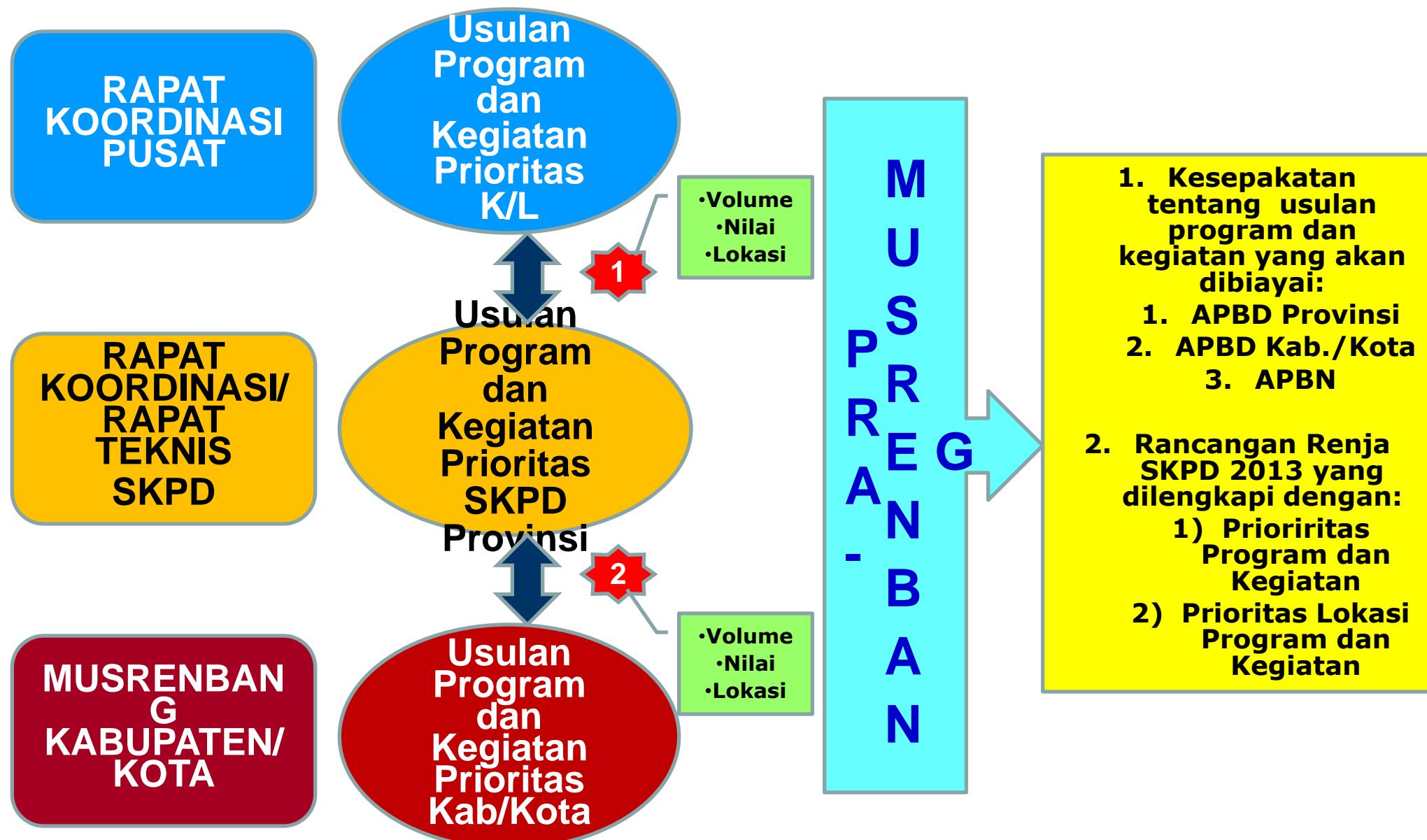
TITIK KRITIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



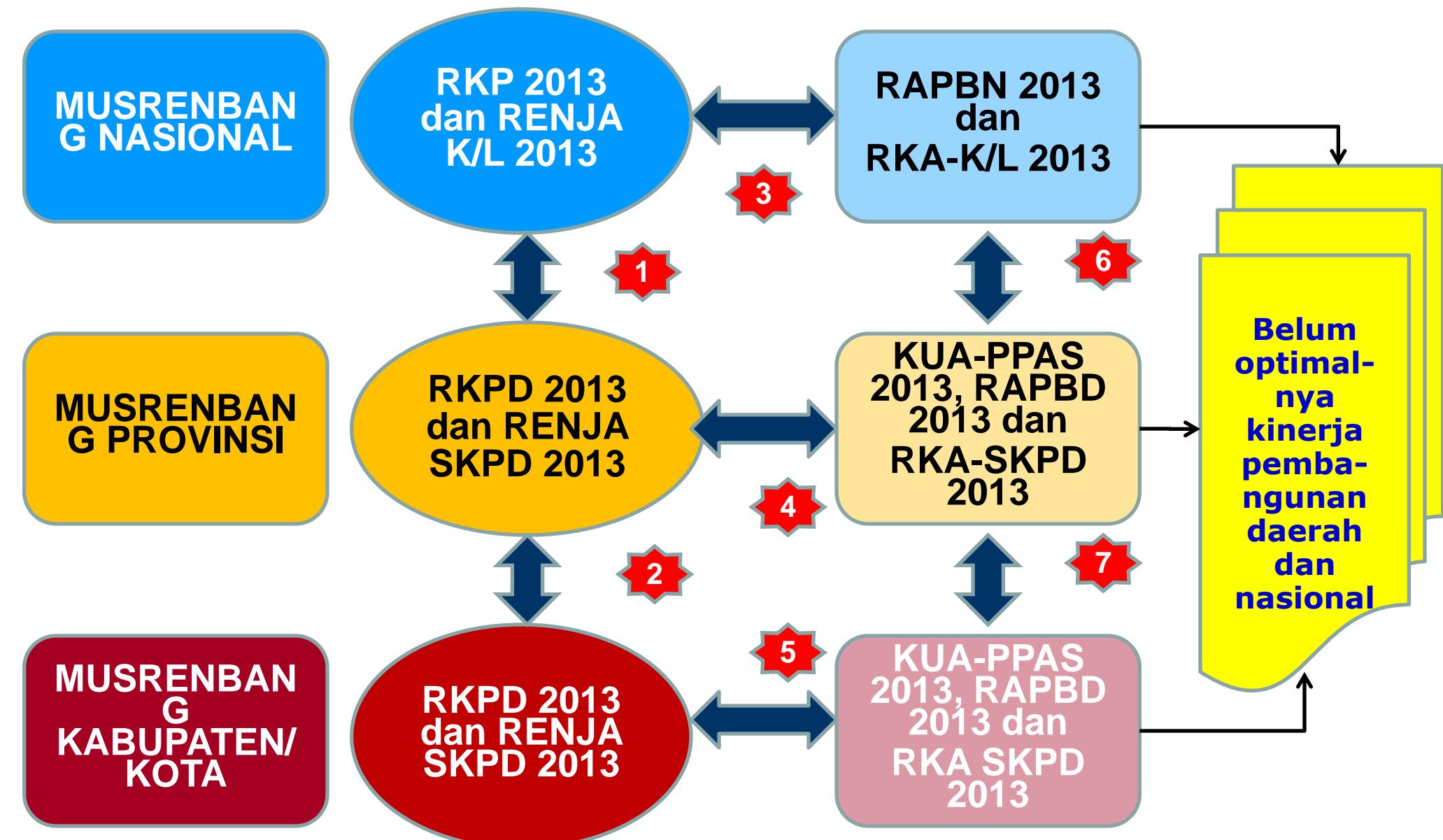
PROSES PENYUSUNAN RKP TAHUN 2013



TITIK KRITIS PERENCANAAN: PENYUSUNAN RKPD



TITIK KRITIS PENGANGGARAN: PENYUSUNAN RAPBD



POLA ALOKASI ANGGARAN MENURUT SEKTOR DAN WILAYAH

Pola Alokasi pagu yang diharapkan									Saat Ini
SKPD	Prov SKPD	Kab. 1	Kab. 2	Kab. 3	Kab. 4	Kab. 5	Kab. 6	Kota. 7	Subtotal
Kesehatan	A _P %	A ₁ %	A ₂ %	A ₃ %	A ₄ %	A ₅ %	A ₆ %	A ₇ %	TA%
Pendidikan	B _P %	B ₁ %	B ₂ %	B ₃ %	B ₄ %	B ₅ %	B ₆ %	B ₇ %	TB%
Pertanian	C _P %	C ₁ %	C ₂ %	C ₃ %	C ₄ %	C ₅ %	C ₆ %	C ₇ %	TC%
Perindustrian dan Perdagangan	D _P %	D ₁ %	D ₂ %	D ₃ %	D ₄ %	D ₅ %	D ₆ %	D ₇ %	TD%
PU	E _P %	E ₁ %	E ₂ %	E ₃ %	E ₄ %	E ₅ %	E ₆ %	E ₇ %	TE%
...	Z _P %	Z ₁ %	Z ₂ %	Z ₃ %	Z ₄ %	Z ₅ %	Z ₆ %	Z ₇ %	TZ%
Subtotal	TP _P %	TW ₁ %	TW ₂ %	TW ₃ %	TW ₄ %	TW ₅ %	TW ₆ %	TW ₇ %	TT%

Format RKPD dan RAPBD selain pagu menurut SKPD juga pagu menurut Kabupaten/Kota

CONTOH POLA ALOKASI KEGIATAN MENURUT SEKTOR DAN WILAYAH

Dinas/SKPD	Alokasi Kegiatan dan Anggaran Menurut Wilayah					
	Kantor Dinas Prov.	Kab A	Kab B	Kab C	Kab D	Subtotal
Kesehatan	7%	2%	2%	2,5%	1,5%	15%
Pendidikan	8%	3%	3,5%	3,5%	2%	20%
Pertanian	5%	4%	2%	3%	1%	15%
Perindustrian dan Perdagangan	4%	1%	1%	1%	3%	10%
PU	10%	5%	4%	4%	7%	30%
...	4%	1%	1%	1%	3%	10%
Subtotal	38%	16%	13,5%	15%	17,5%	100%

POLA KERJASAMA PENGEMBANGAN WILAYAH

PENINGKATAN KAPASITAS DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI

ISU STRATEGIS	POTENSI RISIKO	ANTISIPASI
1. Persaingan antardaerah dan antarnegara yang ketat: efisiensi, produktivitas dan nilai tambah	Relatif tertinggal dibanding daerah atau negara lain yang lebih efisien dan produktif dalam menciptakan nilai tambah yang tinggi	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan keunggulan daerah (komparatif dan kompetitif): sektor, komoditas dan jasa unggulan
2. Penerapan standardisasi barang dan jasa: isu lingkungan, HAM, dan buruh	Terhambatnya perdagangan akibat lemahnya pemahaman isu global	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan kebijakan yang responsif terhadap isu, kesepakatan dan hukum internasional
3. Perubahan teknologi dan informasi	Tertahannya laju pertumbuhan dan pembangunan	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan ekonomi kreatif dan berbasis iptek (<i>knowledge-based economy</i>)
4. Fluktuasi Harga: pangan, minyak, dan mata uang	Rentan terhadap krisis pangan, krisis energi, krisis moneter, dan krisis ekonomi	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan manajemen krisis dan mitigasi krisis
5. Aliran modal yang cepat: negara asing dan lembaga internasional	Gelembung ekonomi (<i>bubble economy</i>) yang tidak produktif	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan jaring pengaman (<i>safeguarding</i>)

PENINGKATAN KAPASITAS DALAM MENGHADAPI DEMOKRATISASI

ISU STRATEGIS	POTENSI RESIKO	ANTISIPASI
1. Proses politik yang mahal	<ul style="list-style-type: none">• Adanya pemborosan uang negara• Investasi yang tidak produktif	<ul style="list-style-type: none">• Percepatan konsolidasi demokrasi
2. Benturan birokrasi dan kepentingan politik	Tidak optimalnya kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan birokrasi berbasis kinerja dan meritokrasi
3. Rekrutmen pemimpin berdasarkan popularitas, bukan kapasitas	Kurangnya komitmen pemimpin dalam memenuhi hak-hak dasar rakyat	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kebijakan publik yang inovatif dan memihak rakyat
4. Kinerja politik dalam perumusan kebijakan (legislasi, penganggaran, pengawasan)	<ul style="list-style-type: none">• Tingginya biaya transaksi (<i>transaction cost</i>)• Munculnya ketidakpastian	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan perumusan kebijakan yang partisipatif, akuntabel dan transparan
5. Dualisme politik daerah dan pusat	Tidak adanya kesinambungan (<i>missing link</i>) antara aspirasi rakyat di daerah dan tindakan elit politik	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan tata politik yang lebih baik dan bermutu

PENINGKATAN KAPASITAS DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH

ISU STRATEGIS	POTENSI RESIKO	ANTISIPASI
1. Ketidapastian hubungan pusat, provinsi dan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none">• Lemahnya koordinasi dan sinergi pusat-daerah• Tidak optimalnya pengelolaan anggaran negara dan daerah• Konflik antardaerah	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan forum-forum kerjasama antardaerah
2. Rendahnya mutu layanan publik: Standar Pelayanan Minimal	Lambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan dan pelaksanaan manajemen berbasis kinerja
3. Lemahnya manajemen sumberdaya dan asset daerah: tata ruang, SDA, tanah, laut	<ul style="list-style-type: none">• Gagalnya pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan• Meningkatnya kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Penataan dan pengembangan manajemen sumber daya dan asset daerah• Perencanaan tata ruang dan tata guna lahan
4. Belum berjalannya reformasi birokrasi daerah	<ul style="list-style-type: none">• Munculnya ketidakpastian dan kelambahan	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sistem insentif dan disinsentif
5. Lemahnya kerjasama dan kemitraan pemerintah dan swasta	<ul style="list-style-type: none">• Rendahnya investasi	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan dan pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta

SINERGI PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

AGENDA	FOKUS	BENTUK KEMITRAAN	
		Antarprovinsi	Antarkabupaten/kota
1. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi	1.Pengembangan Koridor ekonomi: sektor dan komoditas unggulan	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Prasarana Pengembangan Klaster 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan prasarana Pengembangan Klaster
	2.Penguatan keterkaitan (koneksivitas): jaringan infrastruktur	Pembangunan prasarana	Pembangunan prasarana
	3.Pengembangan kemampuan Iptek: inovasi daerah	Kegiatan riset unggulan	Kegiatan riset unggulan
2. Pengurangan Kemiskinan dan pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan masyarakat Pemerataan 	Fasilitasi dan Pendampingan	Fasilitasi dan Pendampingan
3. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> 1.Pengembangan sistem informasi SDA dan LH 2.Rehabilitasi lahan dan perairan kritis 3.Revitalisasi DAS 	<ul style="list-style-type: none"> Data dasar Jaringan informasi riset Pilot proyek Investasi bersama 	<ul style="list-style-type: none"> Data dasar Jaringan informasi riset Pilot proyek Investasi bersama
4. Peningkatan kapasitas Pemda	<ul style="list-style-type: none"> 1.Pendidikan dan Pelatihan 2.Pengembangan Sistem Informasi 	Benchmarking Kerjasama	Benchmarking Kerjasama
5. Manajemen SDA dan LH, dan Mitigasi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> 1.Penyiapan Master plan 2.Penyiapan Rencana Aksi 3.Penyiapan Kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> Masterplan wilayah terpadu Kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> Masterplan wilayah terpadu Kelembagaan

KOMENTAR KUESIONER

STANDAR KUESINOER

1. Substansi

- (1) Menggali data dan informasi (*data mining*) → Apa? Berapa?
- (2) Menggali opini dan persepsi → Bagaimana? Mengapa?
- (3) Menggalang dukungan → Siapa? Bagaimana? Mengapa?

2. Isi Kuesioner

- (1) Pendahuluan: Latar belakang, maksud dan tujuan
- (2) Identitas Responden: Terbuka atau Tertutup
- (3) Disclaimer: Rahasia dan Terbatas
- (4) Gradasi Pertanyaan: Umum dan Khusus
- (5) Tipe Pertanyaan: Terututup dan atau Terbuka
- (6) Waktu Mengisi: Cepat atau Lama

3. Format Kuesioner

- (1) Ringkas
- (2) Menarik
- (3) Tidak Merepotkan

TERIMA KASIH.